ISSN : 1979-6579

Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 45 Volume 12 Maret 2016

Pemerintah Fokuskan Pembangunan Kelistrikan di Indonesia Timur

PNS Ketenagalistrikan Menyerahkan Empat Tersangka Pencurian Listrik

Target-Target Kinerja Subsektor Ketenagalistrikan T.A. 2016

Pembangunan Ketenagalistrikan Harus Perhatikan Lingkungan

Registrasi SLO Online Masuk 99 Besar Inovasi Pelayanan Publik

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

mendukung Zona Integritas
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
serta
Wilayah Bebas dari Korupsi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id

Buletin Ketenagalistrikan
Edisi 45 Volume 12|
MARET 2016

SUSUNAN REDAKSI
Penanggung Jawab
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur
Totoh Abdul Fatah
Wiwid Mulyadi
Heru Setiawan
Ear Marison
Hagni Surendro
Sudarti
Jackson Frans
Fathorrahman
Hari Dwi Wijayanto
Pandu Satria Jati B
Anggita Miftah Hairani
David F Silalahi
Ahmad Amiruddin
Miftah Haris
Novan Akhiriyanto
Dina Andriani
Hening Surya Bayu A.
Fanny Ristantono
M. Tomas Triananta

Penyunting/ Editor
Hutami Hikma Asih
Ernawaty
Sahri Mahmud
Ridwan Budi Santoso

Desain Grafis/Fotografer
Achmad Yusuf Haryono
Agus Supriyadi
Ajat Munajat
Agah Muhammad Abduh
Adar

Sekretariat
Emi Tursilah
Irman Suryana
Novi Pravitasari
Lutfhi
Dewi Agustini

Alamat Redaksi
Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.djk.esdm.go.id

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan memiliki peran penting dalam penegakan aturan di bidang ketenagalistrikan. Awal tahun PPNS Ketenagalistrikan telah menangkap pelaku pencurian listrik yang merugikan PLN sebesar Rp167 miliar dan menyerahkannya ke Kejaksaan RI. Dalam Tajuk Utama BULETIN KETENAGALISTRIKAN edisi 45 Volume XV ini dibahas mengenai serba-serbi PPNS mulai dari kewenangan hingga tantangan di masa depan.

Dalam Liputan Khusus, simak artikel mengenai *Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2016* yang diselenggarakan awal tahun 2016. Forum ini digagas Indonesia untuk mendorong pemanfaatan energi bersih. Dalam BCEF ini pula dilakukan beberapa kerja sama penting di sektor ketenagalistrikan.

Berita lainnya yang kami sajikan dalam buletin edisi perdana tahun 2016 ini antara lain fokus pemerintah untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia bagian timur, inovasi pelayanan publik berupa Sertifikat Laik Operasi (SLO) Online, serta laporan dari Meksiko tentang reformasi subsidi. Selamat membaca!

Salam Redaksi

Redaksi BULETIN KETENAGALISTRIKAN menerima artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :
1.Font penulisan naskah menggunakan Arial
2.Ukuran font yang digunakan 12
3.Jarak spasi penulisan 1,5
4.Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:
1.Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2.Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3.Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4.Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5.Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6.Naskah dikirim melalui email ke humas.djk@gmail.com
7.Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan *caption*
8.Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9.Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

DAFTAR ISI

20 Pemerintah Fokuskan Pembangunan Kelistrikan di Indonesia Timur

Dari Redaksi

Tajuk Utama

6 Peranan PPNS Ketenagalistrikan dalam Penegakan Undang-Undang Ketenagalistrikan

11 PNS Ketenagalistrikan Menyerahkan Empat Tersangka Pencurian Listrik

Liputan Khusus

Bali Clean Energy Forum 2016

12 Bali Jadi Contoh Pengembangan Energi Bersih

14 Kerja Sama Sektor Listrik di BCEF 2016

15 Komposisi Energi Bersih Untuk Pembangkit Listrik Ditingkatkan

Warta Kita

17 Kejagung Kawal Program Pembangunan Ketenagalistrikan

18 Dukungan Berbagai Kementerian/Lembaga Terhadap Program 35.000 MW

19 Target-Target Kinerja Subsektor Ketenagalistrikan T.A. 2016

20 Pemerintah Fokuskan Pembangunan Kelistrikan di Indonesia Timur

23 Pemerintah Fokus Permudah Perizinan

24 Prosedur Sambungan Listrik Dipermudah melalui Layanan Satu Pintu

26 Tanpa SLO, PLN Tak Dapat Sambung Listrik

27 Apresiasi Pemerintah untuk PPK Satker UIP dan Lisdes

28 Pembangunan Ketenagalistrikan Harus Perhatikan Lingkungan

32 Registrasi SLO Online Masuk 99 Besar Inovasi Pelayanan Publik
33 Sistem Regitrasi SLO Online Terus Ditingkatkan
35 Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Workshop Reformasi Subsidi Energi di Meksiko
36 Laporan Dari Meksiko: Saatnya Era Reformasi Subsidi Energi
38 Kementerian ESDM Bangun 90 PLTS di Tahun 2016
39 Menteri ESDM: Saatnya Perencanaan Ketenagalistrikan Dilakukan Secara Terbuka
40 Menteri ESDM Beri Perhatian Besar Pada Program Infrastruktur Ketenagalistrikan
42 Forum Pemimpin EBTKE Hasilkan Komitmen Bangun Infrastruktur Kelistrikan
52 *Indonesia - Japan 2nd Workshop on Power Sector Development*
53 Pengalaman Berharga dari Tri Risma Harini
54 *Getting Electricity* Indonesia Membaik
56 Pemerintah Dorong Pemanfaatan Limbah PLTU
57 Menteri ESDM Lantik Sesditjen Ketenagalistrikan

Galeri

30 TPA Benowo Ubah Sampah Jadi Energi

Resensi

34 -*An Investor's Guide to The Electricity Economy*
-Ekspedisi Tanah Papua

Profil

44 Sudirman Said Berbagi Inspirasi dalam *One Hour University*

Kolom

46 Menuju Subsidi Listrik Tepat Sasaran
50 Bonus Listrik dan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik

Pojok Peraturan

58 Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari - Maret 2016

Peranan PPNS Ketenagalistrikan dalam Penegakan UU Ketenagalistrikan

Bali Jadi Contoh Pengembangan Energi Bersih

Tandatangan Kontrak Dilakukan Serentak

Ditjen Gatrik Raih Booth Terbaik di Festival Iklim 2016

Tajuk Utama

PERANAN PPNS KETENAGALISTRIKAN DALAM PENEGAKAN UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN

Kepala PPNS Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu memberikan keterangan pada saat penyerahan tersangka kasus pidana ketenagalistrikan (11/2).

Pendahuluan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah berlangsung dengan penuh dinamika sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan. Dalam praktiknya, pengawasan dan pembinaan ketenagalistrikan tidak cukup, diperlukan penegakan sanksi untuk memberikan efek jera dan mencegah pihak lain melakukan tindakan pelanggaran hukum yang serupa.

PPNS Ketenagalistrikan merupakan unsur dari Ditjen Ketenagalistrikan yang memiliki kewenangan dalam penegakan aturan pidana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PPNS diaktifkan kembali oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk menekan *losses* jaringan PT PLN (Persero)[1]. Sejak pengaktifan kembali tersebut, PPNS dengan keterbatasan jumlah personil telah berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus ketenagalistrikan yang merugikan negara milayaran rupiah.

Tindak Pidana bidang Ketenagalistrikan

Terdapat sembilan jenis tindak pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Adapun tindak pidana tersebut adalah[2] :

(1)Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin;

(2)Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi;

(3)Menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah;

(4)Tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan (orang mati, suplai terganggu/ terputus);

(5)Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;

(6)Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman;

(7)Melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin;

(8)Mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi;

(9)Memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI wajib, menyatakan sesuai standar tanpa sertifikat)

Adapun pidana yang diberlakukan adalah pidana denda dan pidana penjara. Pidana penjara ancaman terendahnya adalah 3 tahun dan terlama adalah 10 tahun. Adapun denda adalah Rp500 juta s.d Rp2,5 miliar.

Kewenangan PPNS Ketenagalistrikan

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan gerbang awal dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil dikarenakan upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan melalui penyidikan [3]. Penyidik terbagi atas dua jenis, yaitu penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil [4]. Penyidik Kepolisian memiliki ruang lingkup tugas umum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara ruang lingkup kewenangan PPNS sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya [5].

"PPNS Ketenagalistrikan merupakan unsur dari Ditjen Ketenagalistrikan yang memiliki kewenangan dalam penegakan aturan pidana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan."

PPNS Ketenagalistrikan dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. PPNS Ketenagalistrikan adalah salah satu PPNS yang memiliki wewenang yang bisa dibilang lengkap, kewenangan PPNS Ketenagalistrikan mencakup mulai dari pemeriksaan termasuk menangkap dan menahan. Adapun kewenganan PPNS Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut [2]:

(1)Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pindana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

(2)Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

(3)Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

Empat tersangka kasus pencurian listrik. Modus mereka adalah mempengaruhi pengukuran listrik sehingga pembayaran listriknya menurun.

(4)Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
(5)Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
(6)Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
(7)Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
(8)Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang menarik dari kewenangan tersebut di atas, kewenangan PPNS Ketenagalistrikan lebih lengkap dibandingkan dengan PPNS Migas yang tidak memiliki kewenangan menangkap dan menahan[6]. Wilayah kerja PPNS Ketenagalistrikan adalah seluruh Indonesia, sehingga jumlah personil yang ada sangat terbatas untuk mengawasi seluruh wilayah tersebut.

Sinergi PPNS dengan Inspektur Ketenagalistrikan

Terdapat dua unit pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang disebut dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, yaitu PPNS Ketenagalistrikan dan Inspektur Ketenagalistrikan. Dalam praktek pidana ketenagalistrikan, Inspektur Ketenagalistrikan dapat menjadi pihak yang melakukan analisa teknik dan melaporkan adanya tindak pidana kepada PPNS Ketenagalistrikan. Inspektur Ketenagalistrikan merupakan jabatan fungsional yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan keteknikan. Inspektur ketenagalistrikan telah banyak bersinergi dengan PPNS Ketenagalistrikan dalam kasus-kasus penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum maupun kasus tidak terpenuhinya keselamatan ketenagalistrikan.

Sinergi PPNS dengan Penegak Hukum

Selama ini sinergi PPNS Ketenagalistrikan dengan penegak hukum lain khususnya dengan Kejaksaan dan Kepolisian

berjalan dengan baik. Untuk koordinasi dan pengawasan dilaksanakan dengan Bareskrim Polri serta dengan Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

PPNS Ketenagalistrikan merupakan salah satu dari empat unit PPNS pada Kementerian ESDM. PPNS yang lain adalah PPNS Mineral dan Batubara, PPNS Migas, dan PPNS Panas Bumi. PPNS Minerba di bawah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang menegakkan Undang-Undang Mineral dan Batubara nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. PPNS Migas berada di Direktorat Jenderal Migas dan BPH Migas yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, adapun PPNS Panas Bumi yang menegakkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Saat ini telah dilaksanakan reorganisasi PPNS di lingkungan Kementerian ESDM dimana sebagai Koordinator PPNS se-Kementerian ESDM adalah Inspektorat Jenderal KESDM.

Kasus-kasus Ketenagalistrikan

PPNS Ketenagalistrikan telah dan sedang melaksanakan penyidikan pada beberapa kasus akibat pencurian tenaga listrik. Pencurian listrik menyebabkan tingginya susut non-teknis PLN. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah kasus pencurian listrik yang berlokasi di CV Bima Polyplast Solo, PT Toyoplas Cikarang, Pabrik plastik di Tangerang, dan PT Wirajaya Packindo.

Salah satu kasus yang menyita perhatian yang telah diungkap dan sedang didalami PPNS Ketenagalistrikan adalah kasus pencurian listrik yang berlokasi di Pabrik Kertas PT Wirajaya Packindo. PPNS Ketenagalistrikan telah melakukan serangkaian penyidikan dan berhasil menemukan empat orang tersangka yang melakukan upaya mempengaruhi pengukuran listrik sehingga pembayaran listriknya menurun. Kerugian negara akibat perbuatan tersebut diperkirakan sebesar Rp167 milyar, mengingat besarnya kapasitas daya terpasang pada pabrik tersebut.

> **"Kewenangan PPNS Ketenagalistrikan lebih lengkap dibandingkan dengan PPNS Migas yang tidak memiliki kewenangan menangkap dan menahan."**

Keempat tersangka masing-masing TF, AET, W dan S yang semuanya adalah karyawan rekanan PT PLN (Persero). Kepala PPNS Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu menyatakan bahwa PPNS Ketenagalistrikan masih melakukan pendalaman keterlibatan pemilik pabrik dalam kasus tersebut [7].

Secara umum modus yang digunakan oleh Tersangka dalam melakukan pencurian listrik adalah
1)Melakukan sambungan langsung dari tiang saluran rumah ke dalam instalasi rumah;
2)Melakukan sambungan langsung pada kWh meter sehingga arus yang terbaca mengalami penurunan;
3)Memutus pengukuran ke kWh meter pada jam-jam tertentu.

> **"Jumlah PPNS sangat sedikit dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia yang harus diawasi oleh PPNS, sementara kasus-kasus ketenagalistrikan masih terus bermunculan setiap tahun."**

Tantangan PPNS Ketenagalistrikan

PPNS Ketenagalistrikan menghadapi beberapa tantangan dalam penegakan Undang-undang nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia Penyidik Ketenagalistrikan.

Saat ini jumlah PPNS Ketenagalistrikan hanya 24 orang yang tersebar pada unit-unit eselon 2 yang berbeda pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia yang harus diawasi oleh PPNS, sementara kasus-kasus ketenagalistrikan masih terus bermunculan setiap tahun.

Tantangan lain adalah organisasi PPNS yang sifatnya belum dalam wadah permanen yang berada dalam satu unit penyidikan. Anggota-anggota PPNS Ketenagalistrikan adalah pejabat fungsional dan struktural yang juga memiliki tanggung jawab pada unitnya masing-masing.

Meskipun demikian, adanya dukungan dari jajaran pimpinan Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam operasional PPNS telah dapat mendorong PPNS Ketenagalistrikan untuk tetap dapat berkiprah dalam penegakan Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Kesimpulan

•PPNS Ketenagalistrikan sebagai salah satu unit Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan peraturan perundangan-undangan.

•Dengan luasnya kewenangan PPNS Ketenagalistrikan dan makin meningkatnya konsumsi tenaga listrik, maka menjadi tantangan PPNS untuk lebih memperkuat sumber daya di antaranya dengan mendorong pembentukan PPNS Ketenagalistrikan di daerah.

•Organisasi PPNS Ketenagalistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan perlu lebih dioptimalkan dengan membuat satu unit organisasi yang khusus menangani penyidikan.

Referensi:

[1](2015, 6 Mar.). PLN Diminta Laporkan Pencurian Listrik Kepada Pemerintah. Available: http://www1.djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=3857

[2]"Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan," Lembar Negara Republik Indonesia Nomor, vol. 133.

[3]Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. Available: https://elisatris.wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/

[4]M. Karjadi and Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar (serta Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaanya): Politeia, 1988.

[5](3 Mar.). Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan. Available: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan

[6]R. Indonesia, "Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi," Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, vol. 136.

[7]"Kasus Dugaan Penggunaan Listrik Yang Bukan Haknya Di PT Wirajaya Packindo," ed. Jakarta: PPNS Ketenagalistrikan, 2016.

Penulis: Ahmad Amiruddin, ST. MSc
Inspektur Ketenagalistrikan Muda/ PPNS Ketenagalistrikan

PPNS Ketenagalistrikan Serahkan Empat Tersangka Pencurian Listrik

Empat tersangka diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Kasus pencurian listrik ini telah merugikan PLN sebesar Rp167 miliar.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyerahkan empat orang tersangka pencurian listrik ke Kejaksaan Negeri Tangerang (11/2). Empat orang tersangka yang merupakan petugas *outsourcing* pelayanan teknik PLN tersebut sebelumnya telah mendekam selama dua bulan di Lapas Cipinang. Kasus pencurian listrik ini telah merugikan PLN sebesar Rp167 miliar. Pencurian ini melibatkan PT Wirajaya Packindo yang bergerak di bidang industri kertas. Perusahaan tersebut terbukti telah melakukan kecurangan listrik.

Berdasarkan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) pada tanggal 16 Desember 2014, terbukti telah terjadi kelainan pada kWh meter di PT Wirajaya Packindo. Dan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum berupa hilangnya beberapa segel pada kelengkapan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) tenaga listrik.

Kepala PPNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jisman Hutajulu mengatakan pencurian dilakukan dengan merusak alat pembatas dan pengukur listrik. Perusakan itu menyebabkan alat tersebut tidak dapat mengukur energi yang digunakan.

"Modusnya mengotak-atik pengkawatan sehingga mempengaruhi pengukuran," kata dia. Jisman menjelaskan, pencurian dilakukan mulai tengah malam, yaitu jam 24.00 WIB. Kawat dilepas dan dipasang lagi saat jam 06.00 WIB. "Itu dilakukan berulang-ulang," katanya.

Sesuai pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar."

Selain ketentuan pidana tersebut, penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum PT. Wirajaya Packindo juga dikenakan tagihan susulan (TS) sebesar Rp 167,8 miliar sesuai dengan KepDir PLN Nomor 1468.K-I/DIR/2011.

Proses hukum yang ditangani oleh PPNS Ketenagalistrikan tengah berjalan dan tersangka kasus ini sudah berada di Kejaksaan Negeri Tangerang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini penyidik PPNS terus mengumpulkan informasi, apakah PT Wirajaya satu-satunya perusahaan yang menerima jasa listrik ilegal dari keempat tersangka tersebut.

"Kami masih kembangkan untuk mencari pelaku lain," pungkas Jisman. (UH)

Bali Jadi Contoh Pengembangan Energi Bersih

Tari tradisional Bali ditampilkan dalam pembukaan BCEF (11/2).

Pulau Bali akan dijadikan percontohan pengembangan energi bersih. Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menyampaikan bahwa Pulau Dewata ditargetkan dapat mandiri 100% dengan mengembangkan energi bersih. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan *Bali Clean Energy Forum* (BCEF) 2016 yang dihelat di Nusa Dua Bali, Kamis (11/2).

Bali sebagai percontohan energi bersih memang sudah digaungkan sejak tahun 2015. Bali diambil sebagai percontohan karena pulau ini telah menjadi tujuan wisata dunia. Selain itu Bali sudah mengembangkan berbagai energi bersih sebagai pembangkit listrik. Saat ini Bali telah memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di Kabupaten Karangasem dengan kapasitas 1 MWp *On-Grid*, PLTS Bangli 1 MWp *On-Grid* dan 6 Unit PLTS 15 kWp *Off-Grid*. Selain itu pada 2014 lalu telah dibangun PLT Biomassa berkapasitas 400 kilowatt hour (kWh) dengan limbah bambu sebagai bahan baku. Percontohan energi bersih di Bali akan terus dikembangkan melalui pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik, pengembangan jaringan gas kota, memaksimalkan energi baru terbarukan dan penerapan prinsip-prinsip energi bersih.

Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, BCEF 2016 ini akan menghasilkan sebuah dokumen yang akan dinamai 'Misi Bali untuk Pengembangan Energi Bersih'. Misi Bali tersebut akan menjadi kerangka kerja perwujudan energi bersih nasional dan kontribusinya dalam konteks regional dan global dalam mewujudkan pembangunan dunia yang berkelanjutan. Menurut Sudirman, saat ini dunia membutuhkan keseimbangan baru. Di satu sisi dunia dihadapkan dengan kenyataan akan ketersediaan energi fosil yang semakin terbatas, di sisi lain ada kebutuhan untuk mendorong penggunaan teknologi energi bersih.

Salah satu bentuk partisipasi Indonesia dalam pengembangan energi bersih adalah melalui pengembangan *Center of Excellence* Energi Bersih. *Center of Excellence* (CoE) ini adalah pusat terpadu bagi penelitian,

Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Fatih Birol menyampaikan paparan dalam pembukaan BCEF

Gubernur Bali I Made Mangku Prastika menyampaikan Bali ditargetkan dapat mandiri 100% dengan energi bersih

pengembangan hasil penelitian, pendidikan, peningkatan kapasitas pelaksanaan, hingga fasilitasi investasi dalam pengembangan energi bersih.

Tiga menu utama dalam CoE ini adalah informasi, teknologi dan pendanaan. CoE Indonesia akan mendukung upaya percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi 23% dalam komposisi bauran energi nasional pada tahun 2025. Menurut Sudirman, dalam jangka 4 tahun kedepan, CoE akan berfokus pada upaya mendukung program pembangunan ketenagalistrikan 35 GW, dimana 25% atau sekitar 8.8 GW akan datang dari energi terbarukan, dan 25% lagi dari energi gas. (PSJ)

Kanan atas - Para peserta BCEF merupakan perwakilan dari negara-negara serta lembaga di berbagai belahan dunia
Kanan bawah - Suasana pembukaan BCEF di Nusa Dua, Bali

Dirut PLN Sofyan Basir tanda-tangan kontrak kerjasama di ajang BCEF 2016

Kerja Sama Sektor Listrik di BCEF 2016

Hari pertama perhelatan *Bali Clean Energy Forum* (BCEF) 2016, Kamis (11/2) ditandai dengan berbagai kesepakatan investasi di sektor energi bersih termasuk pengembangan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Menurut Menteri Energi dan Sudirman Said, Sudirman Said, terdapat berbagai penandatangan nota kesepahaman dengan nilai bisnis mencapai Rp47,2 triliun. Menurut Sudirman, kesepakatan bisnis tersebut sangat berarti bagi pengembangan energi bersih di Indonesia. Penandatangan tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan besar di bidang energi. "Di tengah keraguan, *we move forward*," jelas Sudirman.

Kesepakatan senilai Rp47,2 triliun tersebut mencakup berbagai proyek seperti pembangunan pembangkit listrik panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan terminal *Liquid Natural Gas* (LNG). Menurut Sudirman, proyek-proyek tersebut akan menyerap 18.300 orang tenaga kerja. Menurutnya Indonesia masih membutuhkan investor asing untuk mengembangkan energi terbarukan. Selain biaya yang besar, energi terbarukan juga memerlukan teknologi tinggi untuk penggunaannya.

"Tidak ada satu pun negara yang mampu memenuhi kebutuhan energi sendirian, karena itu kolaborasi menjadi amat penting," jelasnya. Di sela-sela rangkaian kegiatan BCEF, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) telah melaksanakan beberapa penandatanganan kontrak baru, amandemen Perjanjian Jual Beli Uap (PJBU) dan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) panas bumi dengan PT Indonesia Power dan PT PLN (Persero). Penandatanganan pertama adalah Amandemen PJBU & PJBL dengan PT PLN yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT PGE Irfan Zainuddin dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Kerja sama tersebut meliputi Amandemen PJBU Panas Bumi untuk suplai uap PLTP Lahendong Unit 1 kapasitas 20 Megawatt (MW), Lahendong Unit 2 kapasitas 20 MW, Lahendong Unit 3 kapasitas 20 MW, serta Lahendong Unit 4 dengan kapastitas 20 MW. Selain itu, terdapat Amandemen PJBL Panas Bumi untuk PLTP Kamojang Unit 4 kapasitas 60 MW dan Kamojang Unit 5 dengan kapasitas 35 MW. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Kontrak Baru PJBU dengan PT Indonesia Power untuk suplai uap PLTP Kamojang Unit 1 kapasitas 30 MW, Kamojang Unit 2 kapasitas 55 MW dan Kamojang Unit 3 kapasitas 55 MW.

Salah satu kerja sama internasional yang dibahas dalam BCEF 2016 adalah perjanjian jual beli listrik lintas negara (*power grid*) ASEAN hingga Oseania. Dalam pertemuan bilateral dengan Papua Nugini, terdapat kesepakatan untuk kerja sama listrik di wilayah perbatasan. Indonesia dan Papua Nugini akan berbagi teknologi dan pengembangan SDM. Indonesia siap memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Papua Nugini di Balai Diklat Migas Bontang dan Cepu. Selain itu menurut Sudirman akan ada sharing power dari PLTA mencapai 1.400 MW, sebab Papua Nugini memiliki potensi sungai yang besar untuk dijadikan pembangkit listrik. (PSJ)

Wapres Jusuf Kalla dorong pemanfaatan energi bersih

Komposisi Energi Bersih Untuk Pembangkit Listrik Ditingkatkan

Indonesia akan membangun 2 x 35.000 MW atau sebanyak 70 GW hingga tahun 2025. Komposisi bauran energi untuk pembangkit listrik tersebut akan menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) serta gas mencapai 50%. Sedangkan sisanya menggunakan batubara. Untuk itu Indonesia terbuka untuk investasi energi bersih dengan mengundang calon investor dari dalam luar negeri untuk membangun pembangkit baru dari energi bersih. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menyampaikan pidato pembukaan *Bali Clean Energy Forum* (BCEF) 2016 yang digelar di Nusa Dua Bali, Kamis (11/2). Menurut Wapres, pemerintah menjanjikan kemudahan investasi dengan mempermudah aturan-aturan.

BCEF digelar di Nusa Dua Bali, 11-12 Februari 2016

Forum energi bersih berskala internasional seperti BCEF ini menurut JK penting karena antarnegara dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah energi dan lingkungan hidup yang menjadi prioritas dunia internasional. Menurut JK, Indonesia memiliki kemampuan sumber daya alam yang kaya untuk mengembangkan energi bersih.

"Indonesia berada di tropis. Mudah mengembangkan *solar energy,*" ungkap JK. "Kita banyak gunung berapi, angin, arus laut kuat, dan sungai yg banyak," tegas JK.

Tema BCEF 2016 yakni '*Bridging the Gap Promoting Global Partnership*' menurut JK sesuai dengan kondisi indonesia dalam pengembangan energi bersih. Indonesia disebutnya memiliki kemampuan dan kaya akan sumber daya alam namun kurang memiliki teknologi. Dalam pengembangan energi bersih menurutnya dibutuhkan teknologi, kerjasama, dan efisiensi. JK menggambarkan bahwa *renewable energy*

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan Indonesia memasuki babak baru yakni energi bersih.

pasti *clean*, namun tidak semua *clean* adalah *renewable*. Menurutnya pengembangan energi bersih selalu ada faktor ekonomi yang berperan. Sebagian besar energi bersih disebutnya lebih mahal daripada batubara, sehingga pada akhirnya yang dapat menyelesaikannya adalah teknologi dan kerja sama antar negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan bahwa saat ini Indonesia memasuki babak baru yaitu energi bersih. Tahun lalu indonesia memutuskan bergabung dengan *International Energy Agency* (IEA). Pada saat yang sama, Indonesia masuk ke dalam keanggotaan OPEC. "Akan baik jika punya pengalaman dari keaktifan dalam dua organisasi ini," ungkap Sudirman.

Sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, BCEF 2016 yang dihadiri sekitar 26 negara ini akan bersama-sama mendiskusikan masalah bersama.

"Tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri, oleh karena itu kolaborasi (antarnegara) menjadi penting," jelas Sudirman.

BCEF 2016 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) tanggal 11-12 Februari ini dihadiri oleh lebih dari 1.200 partisipan yang merupakan perwakilan negara-negara di dunia, antara lain Saudi Arabia, Australia, Timor Leste, Malaysia, Papua Nugini, Srilanka, Kamboja, Hungaria, Amerika Serikat, Denmark, Jepang, Swedia, Selandia Baru, Jerman, Swiss, Inggris, Kroasia, Azerbaijan, Norwegia, Kazakhstan, Finlandia, Spanyol, Iran, Perancis, Belgia dan Uni Eropa. Forum ini juga dihadiri perwakilan dunia usaha, pakar di bidang energi, perwakilan masyarakat sipil dan komunitas muda, serta media massa nasional dan internasional. (PSJ)

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) dalam konferensi pers BCEF di Bali.

Kejagung Kawal Program Pembangunan Ketenagalistrikan

Selain pengadaan tanah dan perizinan, persoalan hukum juga menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi agar program pembangunan ketenagalistrikan berjalan sesuai rencana. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memperlancar program percepatan pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW. PT PLN (Persero) membentuk tim imbangan untuk mengawal kinerja Kejaksaan yang telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P). Hal tersebut disampaikan Direktur Operasi Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Nasri Sebayang saat membacakan sambutan Direktur Utama dalam Forum Strategi Nasional Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang diselenggarakan di kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (7/1).

Nasri menyampaikan bahwa program 35.000 MW merupakan program prioritas pembangunan nasional yang membutuhkan antisipasi dari berbagai kendala khususnya persoalan-persoalan yang ujung-ujungnya bermuara di ranah hukum. "Syukur Alhamdulillah pemerintah menjadikan kelistrikan sebagai program strategis nasional," ungkap Nasri. Selanjutnya ia mengapresiasi peran Kejaksaan yang telah membentuk TP4P untuk mendukung pembangunan melalui pengawalan termasuk mencegah kerugian negara. Upaya ini tidak terlepas dari instruksi Preside Jokowi tanggal 22 Juli 2015 pada saat upacara Hari Bakti Adiyaksa. Dalam kesempatan itu Presiden menginstruksikan pengawalan pembangunan salah satunya di sektor ketenagalistrikan.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) M. Adi Toegarisman memandang penting peran sektor ketenagalistrikan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Menurutnya keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai tanpa dukungan fungsi hukum. Untuk itu kejaksaan akan mengawal dan mengamankan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW. "Indonesia peringat 107 dari 175 negara dalam hal penegakan tindak pidana korupsi," ungkap Adi. Untuk itu berbagai perbaikan dilakukan dalam penegakan tindak pidana korupsi. Ia meminta semua pihak mengawal titik-titik rawan korupsi seperti pajak dan pengadaan barang dan jasa.

Nasri Sebayang menyampaikan bahwa Program 35.000 MW adalah program prioritas.

Terobosan yang dilakukan kejaksaan agar proses pembangunan khususnya prioritas pembangunan nasional dapat berjalan adalah menertibkan administrasi terlebih dahulu. Menurutnya aparat penegak hukum bekerja setelah diselesaikan audit dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ia berharap dengan cara tersebut proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa adanya campur tangan dari penegak hukum. Namun ia mengingatkan agar jangan bermain-main dengan korupsi. "Pendampingan ini jangan dijadikan kesempatan menyimpang dari hukum. Ini hanya masalah waktu saja," ungkap Adi.

Forum Strategi Nasional Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ini memang dilatarbelakangi pada surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukan TP4 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan hal tersebut PT PLN telah membentuk Tim Imbangan Pengawal dan Pengaman PT PLN (Persero) dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Tim P4AIK). Perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kepala BPN) menyambut baik pembentukan tim ini. (PSJ)

Dukungan Kementerian/Lembaga Terhadap Program 35.000 MW

Program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi pada awal Mei tahun 2015 memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama Kementerian/Lembaga Negara yang mempunyai wewenang menyelesaikan sumbatan-sumbatan pembangunan infranstruktur ketenagalistrikan. Kementerian BUMN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), serta Kejaksaan Agung menyampaikan komitmennya mendukung salah satu program prioritas nasional ini dalam Forum Strategi Nasional Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang diselenggarakan di kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (7/1).

Edwin Hidayat menyampaikan restrukturisasi PLN dilakukan agar kinerjanya lebih baik.

Deputi Bidang Energi Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan restrukturisasi organisasi PT PLN (Persero) agar kinerja menjadi lebih baik. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memberikan persetujuan atas usulan Direksi PT PLN memekarkan tiga Direktorat Operasi menjadi tujuh Direktorat Bisnis Regional dan Lima Direktorat Fungsional Korporat. "RUPS juga telah menetapkan *roadmap* BUMN untuk menjadikan PT PLN lebih fokus dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan selama tahun 2015 sampai dengan 2019," ungkap Edwin. Hal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara PT PLN (Persero), PT PGN (Persero), PT Pertamina dan PT Bukit Asam untuk sinergi dalam rangka elektrifikasi.

PT PLN (Persero) sendiri menurut Edwin menetapkan target penandatanganan beberapa P*ower Purchase Agreement* (PPA) dengan pengembang *Independent Power Producer* (IPP) berkapasitas di atas 200 MW dan bukan merupakan penugasan dan/atau mendapatkan jaminan dari pemerintah. Target yang dicanangkan PLN adalah sebanyak 25 proyek dengan total kapasitas 19.520 MW. Berdasarkan laporan dari Kementerian BUMN, PLN juga telah melaporkan K*ey Performance Indicator* (KPI) dari PT PLN seperti meningkatnya rasio elektrifikasi, berkurangnya jumlah gangguan, berkurangnya susut jaringan, dan jumlah PPA yang ditandatangani.

Selain itu dari Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Dirjen Pengadaan Tanah Budi Mulyanto menyampaikan bahwa program 35.000 MW mendapatkan prioritas dalam instansinya.

"Nawacita fokus pada infrastruktur, dan infrastruktur tak terlepas dari pengadaan tanah," ungkapnya. Untuk itu pihaknya akan memberlakukan UU no 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai solusi dari berbagai persoalan pembangunan ketenagalistrikan. Budi berharap PLN dan Kementerian ESDM mengajukan perencanaan pengadaan tanah yang detail dan terperinci sehingga tidak memakan waktu. Forum Strategi Nasional Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ini fokus pada pembahasan persoalan hukum. Kejaksaan Agung dan PT PLN bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang selama ini menghambat pembangunan ketenagalistrikan (PSJ)

Target-Target Kinerja Subsektor Ketenagalistrikan T.A. 2016

Rapat Kerja Kementerian ESDM dilaksanakan di Padalarang, Jawa Barat (12/11) untuk update target kinerja tiap unit.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan angka rasio elektrifikasi sebesar 90,15% di akhir tahun 2016. Angka ini meningkat sekitar 2% dari akhir tahun 2015 yang mencapai 88%. Untuk rasio desa berlistrik pemerintah menargetkan angka 99% di akhir tahun nanti. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sujatmiko saat menyampaikan rencana kerja Ditjen Ketenagalistrikan dalam Rapat Kerja yang dipimpin Menteri ESDM serta dihadiri para pejabat Eselon I, 2, dan 3 di lingkungan Kementerian ESDM. Rapat Kerja ini diselenggarakan di Masion Pine, Padalarang, Jawa Barat, Selasa (12/11).

Dalam kesempatan tersebut Sujatmiko juga menyampaikan target-target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tahun 2016 dimana kapasitas pembangkit listrik akan bertambah sebanyak 4.212 MW dengan panjang jaringan transmisi bertambah 10.721 kms. "Penambahan ini tidak terlepas dengan upaya Ditjen Ketenagalistrikan mengejar target 35.000 MW," ungkap Sujatmiko. Untuk itu target investasi di tahun ini ditargetkan mencapai 16,38 Miliar US Dollar. Peningkatan infrastruktur ini dapat tercapai dengan subsidi listrik yang tepat sasaran. "Subsidi listrik tahun ini ditargetkan sebesar 38,38 Triliun Rupiah," tambahnya.

Untuk mencapai target-target kinerja di subsektor ketengalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan memiliki 15 paket lelang sebesar 16 miliar rupiah, dimana 14 paketnya telah berjalan dengan rincian delapan paket siap kontrak Januari, tiga paket di awal Februari dan tiga paket awal Maret 2015. Sujatmiko juga menjelaskan bahwa 73% postur DIPA Ditjen Ketenagalistrikan di tahun 2016 digunakan untuk belanja barang, 25% belanja modal, dan 2% belanja pegawai.

Beberapa kegiatan strategis tahun 2016 yang digalakkan oleh Ditjen Ketenagalistrikan antara lain Pengawasan dan Penetapan TMP PT PLN (Persero), Monitoring dan Verifikasi Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik, Sosialisasi Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Subsidi Listrik, Pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Pidana Ketenagalistrikan (Wasmatlitrik), Pemutakhiran Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2016-2050, Monitoring Pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Kerjasama bidang ketenagalistrikan (nasional, regional dan internasional), *Upgrading Database* Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik, Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan, serta Penataan Aset (BPYBDS kepada PLN dan Hibah kepada Pemda.

Sujatmiko juga menyampaikan bahwa Ditjen Ketenagalistrikan saat ini tengah menuju pelayanan berbasis sistem informasi dengan dimulainya tata persuratan online dan pelayanan registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) online di tahun 2015. Ke depan semua bentuk pelayanan Ditjen Ketenagalistrikan akan berbasis teknologi informasi, sehingga penguatan server, jaringan dan *backup* akan menjadi prioritas. (PSJ)

Menteri ESDM Sudirman Said saat memberikan pengarahan kepada pelaksana kontrak pengadaan barang jasa (14/1).

Pemerintah Fokuskan Pembangunan Kelistrikan di Indonesia Timur

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan difokuskan pada pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) untuk kawasan Indonesia Timur. Pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah merancang program pembangunan infrastruktur energi berbasis EBT untuk desa-desa yang pendanaannya melibatkan investor.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), usai pendandatangan kontrak pengadaan barang/jasa Kementerian ESDM di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (14/1). "APBN tidak mungkin menutupi semua," jelas Rida. Untuk itu dengan mekanisme swasta yang ikut berpartisipasi, target melistriki pulau-pulau terpencil dan terluar dapat dengan cepat direalisasikan.

Keseriusan pembangunan energi di Indonesia Timur juga disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said pada saat menyampaikan pengarahan kepada pelaksana kontrak pengadaan barang/jasa tersebut. Ia bercerita bahwa baru saja mengelilingi Indonesia timur, mulai dari Sorong, Raja Ampat, Papua, Pulau Selaru, Saumlaki hingga ke Ambon. Di pulau Selaru ia bercerita bahwa di sana terdapat tujuh desa, sementara tiga desa yang berlistrik.

"Yang baru dapat listrik baru tiga, yang empat desa masih gelap," ucapnya. Sementara nelayan di sana hanya bisa melaut untuk kebutuhanya sendiri atau kebutuhan sekitar karena tidak punya kapasitas peyimpanan.

Sudirman juga bercerita tentang Nusa Tenggara Timur. "Di perbatasan Timor Leste, listriknya lebih maju dari kita. Tapi di sebelahnya, yang merupakan bagian dari negara kita, masih gelap gulita," ungkapnya. Maka menurutnya ironi jika pegawai di Kementerian ESDM 'bermain-main' dengan pengadaan barang dan jasa.

Di satu sisi banyak rakyat membutuhkan

Penandatanganan kontrak pengadaan barang jasa disaksikan juga oleh Menteri ESDM serta pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.

energi, di sisi yang lain pejabat banyak yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat.

"Cukup sudah pengalaman pahit yang menimpa Kementerian yang saya pimpin sekarang, terjadi di masa lalu saja," kata dia. "Sekarang dan ke depan, itu dijadikan sejarah saja. Ditinggal," tegasnya.

Fokus pembangunan kawasan timur dan pulau terluar juga sesuai dengan desakan Dewan Energi Nasional (DEN). Langkah yang dilakukan pemerintah adalah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Rida Mulyana menyebutkan tahun ini sekitar 131 unit PLTS akan dibangun oleh kementerian ESDM. Adapun kapasitasnya sebesar 15 kilo watt peak (kWp) hingga 250 kWp. (PSJ)

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dan Sesditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyaksikan penandatanganan kontrak antara PPK dan pemenang lelang T.A 2016.

Tandatangan Kontrak Dilakukan Serentak

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (paling kiri) ikut menyaksikan penandatanganan delapan paket kontrak Ditjen Ketenagalistrikan TA 2016

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Ketenagalistrikan, menyaksikan penandatanganan delapan paket kontrak pengadaan barang dan jasa Ditjen Ketenagalistrikan tahun anggaran 2016. Penandatangan yang dilaksanakan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan perusahaan pemenang tender ini dilaksanakan bersamaan dengan 198 paket lelang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan nilai anggaran mencapai 406 miliar rupiah. Penandatanganan kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan di Balai Kartini Jakarta, Kamis (14/1), dengan dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Republik Indonesia, Anang Iskandar.

Penandatanganan ini dihadiri para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengusaha pemenang lelang, dan calon penerima manfaat dari proyek-proyek yang ditandatangani. Kementerian ESDM masih memiliki 387 paket lelang yang akan terus dilakukan penandatanganan kontrak secara bertahap sampai dengan akhir bulan Februari 2016. Paket pengadaan meliputi belanja untuk konstruksi, barang, jasa lainnya, serta konsultan. Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2016 memiliki lima belas paket lelang, dimana tiga paket akan kontrak Februari 2016, tiga paket kontrak pada awal Maret 2016, dan satu paket pertemuan internasional masih menunggu konfirmasi dari Republik Rakyat Tiongkok.

Anang Iskandar dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kinerja Kementerian ESDM yang telah berhasil melakukan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa di awal tahun. "Berarti semua sudah dipersiapkan dengan baik," ungkap Anang. Mantan Kepala BNN ini menyampaikan bahwa tiga hal utama dalam pengadaan barang dan jasa adalah untuk mensejahterakan masyarakat, keadilan, dan kepastian hukum. Tak lupa Anang mengingatkan semua peserta untuk bekerja sesuai aturan.

"Asal semua sesuai aturan, anda dilindungi hukum. Kita tidak akan mencari-cari (kesalahan)," tegas Anang.

Sudirman Said mengingatkan agar seluruh proyek pengadaan harus transparan dan *accountable.* Menurutnya dalam pengadaan barang dan jasa ini, semua bekerja karena pemberian otoritas dari publik melalui pajak. "Tanpa rakyat bayar pajak, kegiatan ini tidak ada, jadi harus transparan, harus *accountable*," tegas Sudirman. Ia sengaja mengundang para penerima manfaat dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur agar ikut mengawasi proses pengadaan barang ini.

Sudirman berpesan pada para pelaku usaha agar tidak mengganggu dengan merayu para petugas pengadaan barang. "Seperti bis kota, dilarang saling menggangu, dilarang saling mendahului," ungkapnya. Sudirman berpesan agar para pejabat pengadaan tidak menempuh risiko sehingga berurusan dengan penegak hukum. Menurutnya jika ada gangguan, para pelaksana diminta menyampaikan kepada Menteri, Irjen atau dirjen. "Kirim pengaduan lewat *whistleblowing system*," tegasnya. (PSJ)

Pemerintah Fokus Permudah Perizinan

Pemerintah terus berupaya mempermudah layanan untuk masyarakat melalui inovasi-inovasi seperti penyederhanaan perizinan untuk semua jenis izin yang berkaitan dengan usaha. Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot menyatakan bahwa semua jenis perizinan yang berkaitan dengan kementerian dan lembaga saat ini sudah diserahkan kepada BKPM dan diurus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Yuliot mengatakan hal tersebut dalam acara *coffee morning* di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kamis (21/01).

Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mendorong penyederhanaan perizinan yang berkaitan dengan usaha.

Yuliot menjelaskan PTSP Pusat bertugas menerima seluruh aplikasi persyaratan perizinan, kemudian penyelesaian teknisnya diserahkan ke kementerian dan lembaga terkait. Apabila sudah selesai, baru dikembalikan ke PTSP untuk selanjutnya diberikan kepada yang mengajukan perizinan.

"Pelayanan perizinan di Indonesia selesai berhari-hari, bisa tiga hingga lima hari. Menurut Presiden, izin yang dihitung perhari terlalu lama. Ini sesuai dengan pengalaman beliau mengurus perizinan usaha di Timur Tengah, dalam waktu satu jam bisa selesai," ujar Yuliot. Ia mengungkapkan Presiden mengharapan perizinan di Indonesia bisa selesai dalam hitungan jam.

Yuliot menambahkan bahwa peringkat Indonesia di *Ease of Doing Business* 2015 mengalami peningkatan 11 peringkat dari 120 menjadi peringkat 109. Presiden menargetkan Indonesia harus menjadi peringkat 40 untuk Ease Of Doing Business pada tahun 2016 ini.

"Tentunya untuk mewujudkan hal ini harus ada kerjasama dengan semua *stakeholder*," Yuliot menyampaikan.

Salah satu indikator yang naik peringkat secara signifikan adalah peringkat *Getting Electricity* atau kemudahan mendapatkan listrik. Akan tetapi, peningkatan pelayanan tetap harus diperhatikan. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan diharapkan dapat menggunakan hitungan jam dalam proses perizinan, bukannya hari. Yuliot mencontohkan, pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) diharapkan bisa diterbitkan pada hari yang sama.

"Pemerintah berusaha melakukan perbaikan-perbaikan untuk *Getting Electricity*. Kita masih tertinggal dibanding negara-negara lain di ASEAN, seperti Vietnam. Tantangan bagi kita untuk menjadi yang terbaik di ASEAN. Peraturan segera dilakukan perbaikan lalu disosialisasikan. Nantinya akan menjadikan Indonesia negara yang berdaya saing dan negara yang sejahtera. Negara yang mudah perurusan perizinan usahanya lebih sejahtera," pungkas Yuliot. (UH)

Prosedur Sambungan Listrik Dipermudah melalui Layanan Satu Pintu

Benny Marbun berharap layanan satu pintu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sambungan listrik.

Keluhan masyarakat tentang rumitnya prosedur mendapat sambungan listrik menjadi salah satu latar belakang adanya layanan satu pintu sambungan listrik. Demikian dikatakan oleh Kepala Divisi Niaga PT PLN (persero) Benny Marbun dalam acara *coffee morning* Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta hari ini (21/1). Layanan satu pintu sambungan listrik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sambungan listrik.

"Dengan layanan satu pintu ini, masyarakat hanya perlu mendatangi PLN. Tidak perlu kemana-mana, cukup satu pintu," ujar Benny.

Yang terjadi selama ini, ada tiga pihak yang terkait dengan pemenuhan permohonan sambungan baru listrik, yakni kontraktor listrik yang diberikan kewenangan untuk mengerjakan instalasi listrik bangunan, Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang menginspeksi apakah suatu instalasi laik operasi atau tidak, dan PLN yang menyediakan listrik. Benny mengungkapkan keluhan masyarakat yang mengaku bingung karena masih harus menghubungi berbagai pihak untuk mendapatkan SLO tanpa ada kejelasan persyaratan serta biaya.

"Ruang lingkup layanan satu pintu nantinya mencakup pembangunan instalasi listrik bangunan, sertifikasi laik operasi, pembayaran biaya pembangunan dan penyambungan," ungkap Benny.

Dengan demikian, masyarakat cukup menghubungi PLN (melalui website PLN, customer care 123, ataupun dengan mendatangi langsung loket PLN) dan membayar seluruh biaya melalui PLN saat mengajukan sambungan listrik. PLN yang nantinya menghubungi serta membayar kontraktor listrik untuk pemasangan instalasi dan menghubungi serta membayar LIT untuk proses sertifikasi kelaikan operasi.

Benny melanjutkan, PLN telah membuat beberapa simulasi metode layanan satu pintu tersebut. Pertama, kontraktor listrik dan LIT dapat memilih calon pelanggan yang paling

dekat dengan kedudukannya. Metode ini mirip dengan cara kerja layanan transportasi berbasis online seperti gojek. Kedua, PLN-lah yang memberikan penugasan pada kontraktor listrik dan LIT. Ketiga, pelanggan dapat memilih sendiri kontraktor listrik dan LIT.

Ketiga metode tersebut memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Berdasarkan hasil diskusi, Benny menyatakan ketiga metode tadi dijadikan satu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan metode kombinasi ini, pelanggan dapat memilih sendiri kontraktor listrik dan LIT. Namun jika pelanggan tidak mau memilih sendiri, maka kontraktor listrik dan LIT-lah yang dapat memilih pelanggan. Jika sampai 1x24 jam tidak ada kontraktor listrik dan LIT yang mengambil pekerjaan tersebut, maka PLN menugaskan keduanya sesuai dengan sistem. Metode kombinasi ini dirasa yang paling sesuai. Akan tetapi, ini belum final.

"Metode yang terbaik masih menunggu penetapan," jelas Benny. Dengan layanan satu pintu ini pula, Benny yakin prosedur pemasangan sambungan baru dari yang biasanya lima bisa dipangkas menjadi hanya tiga prosedur.

"Kalau sekarang masih ada lima prosedur, yakni sertifikasi, permohonan sambungan baru, survey jaringan, pengerjaan sambungan, dan penyalaan, nantinya bisa jadi tiga prosedur, yakni permohonan sambungan baru sekaligus pembayaran, pengerjaan sambungan, dan penyalaan," ungkap Benny.

Sesi diskusi dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan pertanyaan.

Benny mengakui ada beberapa hal yang masih perlu disiapkan terkait pelayanan satu pintu ini. Namun menurutnya, sosialisasi pada masyarakat adalah yang paling utama perlu dilakukan. PLN juga telah menyiapkan masa transisi. Ini adalah masa dimana layanan satu pintu ini telah diimpelentasikan namun *Standard Operating Procedure* (SOP) dan ketentuannya belum diketahui seluruh masyarakat. Masa transisi ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami prosedur penyambungan listrik sesuai dengan peraturan yang berlaku. (AMH)

Coffee morning mengenai layanan satu pintu sambungan listrik diselenggarakan di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan (21/1)

Tanpa SLO, PLN Tak Dapat Sambung Listrik

PT PLN (Persero) tidak dapat menyambung listrik pada bangunan yang tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi tenaga listrik. Hal tersebut ditegaskan Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero), Benny Marbun saat menghadiri coffee morning Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (21/1). Sebelumnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015 tanggal 22 September 2015 menyatakan bahwa jika PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi rumah tanpa memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), maka PLN harus bertanggungjawab atas dampak kerugian yang muncul.

Untuk mempercepat penyambungan listrik ke masyarakat, Ditjen Ketenagalistrikan juga menargetkan waktu sambungan listrik bagi calon pengguna tak lebih dari 40 hari. Keputusan ini merupakan instruksi dari Presiden Joko agar masyarakat tak perlu menunggu lama untuk mendapatkan listrik. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Munir Achmad menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo.

"Kemarin kita rapat dengan bapak Presiden di istana. Jadi berdasarkan instruksi tersebut dari sebelumnya 79 hari, waktu yang dibutuhkan untuk penyambungan listrik tidak boleh lebih dari 40. Ini hasil rapat kemarin sore," ujar Munir. Menurutnya waktu yang ditargetkan ini sudah termasuk waktu penerbitan SLO yang ditargetkan juga akan dipersingkat guna memberi kemudahan sektor usaha yang membutuhkan izin sambungan listrik.

"Jadi jangka waktu penerbitan SLO merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik. Ini juga akan dipercepat," jelasnya.

Akhir tahun 2015 lalu PT PLN (Persero) meminta izin kepada Menteri ESDM Sudirman Said untuk melaksanakan layanan satu pintu sambungan listrik untuk daya sampai dengan 2.200 VA. Menanggapi hal tersebut pada tanggal 31 Desember Menteri ESDM menyetujui konsep tersebut dan menginstruksikan layanan satu pintu per awal 2016. Untuk merealisasikan layanan satu pintu sambungan listrik tersebut harus dibangun sistem online. Sambungan listrik secara terintegrasi dibangun oleh Direktorat Jenderal

Munir Ahmad menyampaikan paparan mengenai SLO

Ketenagalistrikan sebagai regulator, PT PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik dan pemasang instalasi listrik (instalatir), serta Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) sebagai penerbit SLO.

Saat ini Ditjen Ketenagalistrikan telah memiliki layanan register SLO secara online. Layanan ini akan diintegrasikan dengan layanan online yang dimiliki PLN, instalatir dan LIT-TR selaku penerbit SLO. Layanan registrasi SLO dapat diakses melalui slo.djk.esdm.go.id. Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses daftar lembaga inspeksi dan biaya SLO. Selain itu website ini digunakan untuk registrasi SLO yang dilakukan oleh pemerintah. Layanan registrasi SLO sendiri pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri ESDM. Bertepatan dengan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-70 tahun 2015 yang dilaksanakan bulan September tahun lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memberikan penghargaan juara II Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian ESDM kepada Registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) secara online yang dilaksanakan di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko mewakili menerima

Apresiasi Pemerintah untuk PPK Satker UIP dan Lisdes

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan secara simbolis sertifikat penghargaan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja Unit Induk Pembangkitan (UIP) Listrik Perdesaan tahun anggaran 2015 di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Senin (25/1). Pemerintah mengapresiasi para PPK yang berasal dari PT PLN (Persero) yang mampu menyerap anggaran dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Penyerapan anggaran Satker listrik perdesaan tahun anggaran 2015 hingga akhir Desember 2015 mencapai Rp2.751.543.900.876,- atau 88,54% dari total pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp3.107.548.845.000,- dengan realisasi fisik pembangunan JTM dan JTR sebesar 11.497 KMS dan pembangunan Gardu Distribusi sebesar 219,28 MVA serta penyambungan & instalasi listrik gratis sebesar 144.176 RTS. Sedangkan total pagu anggaran untuk Satker UIP sebesar Rp1.172.130.822.000 dengan penyerapan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp49.940.298.467 atau sebesar 4,26%.

Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (tengah). Jarman mengapresiasi PPK dari PLN yang mampu menyerap anggaran dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Jarman dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada para PPK yang berasal dari PT PLN (Persero) tersebut. Menurutnya apa yang telah dikerjakan oleh para PPK adalah sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang bapak ibu sekalian kerjakan itu untuk masyarakat," ungkap Jarman. Dirjen Ketenagalistrikan mengingatkan untuk Satker UIP yang belum selesai pelaksanaan pembangunannya agar segera dilanjutkan dengan menggunakan pendanaan Anggaran PLN sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 0171 K/90/MEM/2015 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Dibiayai dari APBN. Untuk pekerjaan pembangunan jaringan yang sudah selesai, agar segera dilakukanSerah Terima Pekerjaan (STP) dengan GM Wilayah setempat paling lambat 120 hari setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

"Sedangkan untuk Program Penyambungan dan Instalasi Listrik Gratis Kepada Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu yang sudah selesai agar segera dibuatkan Berita Acara Serah Terima dengan Pemerintah Daerah," ungkap Jarman. Hal ini menurutnya sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 206/KPA/DLP.4/2015 tanggal 31 Desember 2016.

Jarman mengingatkan bahwa Satker Lisdes diharapkan menyelesaikan Rekam Jejak Kegiatan Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2015 untuk memudahkan monitoring kegiatan fisik oleh Tim Pemeriksa/APIP. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Unit Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur (UP3I) Taqwallah dan pejabat dari Ditjen Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero). (PSJ)

Pembangunan Ketenagalistrikan Harus Perhatikan Lingkungan

Saat ini Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk mengejar target rasio elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun gencar membangun, pemerintah mengupayakan agar dampak terhadap lingkungan tidak terlalu besar. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman saat menyampaikan materi dalam forum diskusi di Festival Iklim 2016 di Jakarta Convention Center, Senin (1/2). Menurut Jarman program 35.000 MW yang ditargetkan selesai tahun 2019 merupakan kebutuhan yang harus dicukupi. Namun pembangkit listrik yang dibangun harus menggunakan teknoloogi yang ramah lingkungan.

Sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah akan menaikan proporsi pembangkit listrik dari energi baru terbarukan sebanyak 25% di tahun 2020. Pembangkit listrik dari bahan bakar minyak ditargerkan turun menjadi 1%. "BBM untuk pembangkit di tahun 2025 hanya 1% sebagai *backup* daerah-daerah *remote*," ungkap Jarman. KEN tersebut dituangkan lebih lanjut dalam draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dimana batubara akan 25%, gas 24%, EBT 25% dan BBM 1% di tahun 2025.

Festival Iklim berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta (1/2)

Menurut Jarman, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara tetap dipakai dalam komposisi bauran energi. Menurutnya batubara merupakan *backbone* bahan bakar tenaga listrik, untuk itu keberadaanya tetap dibutuhkan tapi harus meningkatkan teknologi dengan *clean coal technology* (CCT). Ke depan, pemerintah akan mengembangkan dua teknologi pembangkit listrik yaitu *ultra super critical* (USC) dan *integrated gasification combined cycle*. Menurut Jarman untuk pembangkit dengan kapasitas 600 MW ke atas harus dibangun dengan *supra critical* (SC) sedangkan kapasitias 1000 MW ke atas dengan USC.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga emisi dengan mengajak semua penyedia energi listrik meningkatkan efisiensi. Menurut Jarman, *roadmap* ketenagalistrikan di Indonesia adalah teknologi yang ramah lingkungan dan harga listrik yang *reasonable*. Menurut Jarman, pemerintah juga akan terus mengembangkan energi terbarukan dari air, matahari, panas bumi dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam kesepakatan Paris 2015 untuk mengurangi emisi salah satunya dari sektor energi.

Dalam kesempatan tersebut Jarman didampingi Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Munir Ahmad mengunjugi beberapa stan terkait sektor ketenagalistrikan dalam Festival Iklim 2016. Selain mengunjungi stan Ditjen Ketenagalistrikan, Jarman juga mengunjungi Cirebon Power, Indonesia Power, Pembangkitan Jawa Bali dan JICA. (PSJ)

Ditjen Gatrik Raih Booth Terbaik di Festival Iklim 2016

Penyerahan piala juara untuk Ditjen Ketenagalistrikan sebagai Juara 1 di Festival Iklim (4/2).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian ESDM meraih juara I *Booth* Terbaik dalam Festival Iklim 2016. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada penutupan Festival Iklim, Kamis (4/2). Dalam *booth* berukuran 3 x 15 meter, Ditjen Gatrik mengajak *stakeholder* bidang lingkungan ketenagalistrikan, yaitu PT Jawa Bali, PT Indonesia Power, dan PT Cirebon Elektrik Power. Ditjen Gatrik mensosialisasikan pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, khususnya mengenalkan *Clean Coal Technology* (CCT) dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Festival Iklim 2016 sendiri mengangkat tema "Di bawah 2° C Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Generasi Mendatang". Acara sendiri diisi dengan seminar, diskusi interaktif, pameran dan showcase good practicepengendalian perubahan iklim, serta berbagai kegiatan yang melibatkan 75 lembaga yang terbuka untuk umum. Festival Iklim ini merupakan tindak lanjut dari *Paris Agreement* atau Kesepakatan Paris di mana warga dunia sepakat mengurangi emisi karbon secepat mungkin.

Para ahli mengatakan, jika laju kenaikan suhu bumi melebihi batas dua derajat, maka perubahan iklim akan sulit dibendung dan menimbulkan bencana skala besar.

Dalam pameran di Festival Iklim tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa Indonesia tengah membangun pembangkit listrik hingga 35.000 MW sesuai dengan kebutuhan hingga tahun 2019. Porsi terbesar dalam program tersebut adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara. Menurut Direktur Ketenagalistrikan, Jarman, batubara merupakan *backbone* bahan bakar tenaga listrik, untuk itu keberadaanya tetap dibutuhkan tapi harus meningkatkan teknologi dengan *clean coal technology* (CCT). Ke depan, pemerintah akan mengembangkan dua teknologi pembangkit listrik yaitu *ultra super critical* (USC) dan *integrated gasification combined cycle*. USC akan dipakai pada tahun 2017, sedangkan IGCC akan diperkenalkan pada tahun 2025.

Penutupan Festival Iklim dihadiri oleh beberapa artis kenamaan yang peduli terhadap perubahan iklim seperti Tasya, Oppie Andaresta, Melanie Subono, dan Nugie. Acara yang dihadiri Siti Nurbaya dan pejabat di lingkungan KLHK ini selain dimeriahkan oleh penampilan artis juga dilangsungkan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba debat, lomba poster perubahan iklim, serta kompetisi lainnya. (PSJ)

TPA BENOWO

UBAH SAMPAH JADI ENERGI

Pusat Komunikasi Publik (Puskom) Kementerian ESDM mengajak humas pemerintah yang tergabung dalam Bakohumas mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo di Surabaya untuk melihat pemanfaatan sampah menjadi energi listrik (31/3). Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo memiliki kapasitas 10 MW.

TPA Benowo dengan luas lahan ± 37,4 Ha ini dikelola oleh PT Sumber Organik dan Dinas Kebersihan dan Pertanahan Kota Surabaya dengan mekanisme kerjasama *Built Operate and Transfer* (B.O.T.) selama 20 tahun dari 2012 hingga 2032. (AMH)

Galeri

FUEL SKID

LV SIDE
400 V
HV SIDE
20000 V
BERBAHAYA !!
TEGANGAN TINGGI
DANGER !!

Registrasi SLO Online Masuk 99 Besar Inovasi Pelayanan Publik

Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) Online masuk dalam 99 besar pelayanan publik terbaik nasional. Untuk itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono dan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan presentasi proposal Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) Online di depan panelis di kantor kementerian PAN-RB, Kamis (10/3). Selain Registrasi SLO Online, pelayanan *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) dari Ditjen Mineral dan Batubara dan "E-Lelang Blok Migas" Penawaran Wilayah Kerja Migas dari Ditjen Migas juga masuk 99 besar.

Secara keseluruhan, sebanyak 2.476 proposal inovasi didaftarkan dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini merupakan ajang kompetisi untuk menilai inovasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk melakukan perbaikan pelayanan publik, mengingat membaiknya investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah buah dari pelayanan publik yang mudah, cepat, dan murah.

Registrasi SLO Online yang dapat diakses oleh masyarakat di slo.djk.esdm.go.id merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengamanahkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi. SLO merupakan syarat penyambungan listrik dengan target penyambungan listrik tiap tahun mencapai 3,6 juta sambungan baru. Penerbitan SLO setiap hari mencapai sekitar 15.000 yang membuat Pemerintah kesulitan mengawasi proses penerbitan SLO dan memonitor jangka waktu penerbitan SLO.

Dalam presentasinya Munir menyampaikan bahwa masyarakat mengeluhkan lama mendapatkan sambungan listrik karena lama mendapatkan SLO. "Keluhan lain, beredar SLO palsu atau bodong agar masyarakat segera mendapatkan sambungan listrik," jelas Munir. Keluhan ini disebutnya juga menjadi temuan World Bank yang melaksanakan survei kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussiness*) yaitu *getting electricity* bahwa penerbitan SLO memerlukan waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari pada tahun 2014. Akibat adanya penerbitan SLO yang tidak sesuai prosedur tersebut juga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran akibat korsleting listrik pada Tahun 2013 sebanyak 300 kejadian dan pada Tahun 2014 sebanyak 309 kejadian.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah berinisiatif untuk mengubah pengawasan SLO yang semula manual menjadi online. Melalui website slo.djk.esdm.go.id, masyarakat atau pemilik instalasi dapat melakukan pengecekan status permohonan SLO, verifikasi keabsahan SLO, pencetakan salinan SLO, serta pendaftaran dan pengecekan kode instalatir. Sedangkan bagi Pemerintah aplikasi ini memiliki fitur untuk *tracking* tenaga teknik pemeriksa dengan titik koordinat berbasis *Global Positioning System* (GPS), Pengecekan detail Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian, Pemantauan ketepatan jangka waktu penerbitan SLO, dan Pemutakhiran data secara terintegrasi.

Dengan adanya aplikasi ini, penerbitan SLO di seluruh wilayah Indonesia menjadi lebih cepat, sepanjang tahun 2015, 84% dilakukan kurang dari tiga hari kerja, sedangkan 16% dilakukan lebih dari tiga hari kerja. "Bahkan sebesar 72% penerbitan SLO dilakukan kurang dalam satu hari kerja," jelas Munir. Selain itu dengan sistem ini secara tidak langsung terjadi peningkatan peringkat Indonesia dalam survey *Getting Elecricity* yang dilakukan oleh World Bank, yaitu dari peringkat 147 pada tahun 2013 menjadi peringkat 101 pada tahun 2014 dan peringkat 45 pada tahun 2015. (PSJ)

Sistem Registrasi SLO Online Terus Ditingkatkan

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman saat meresmikan PT Jasa Sertifikasi Indonesia di Mataram (14/2) menyampaikan bahwa SLO online akan ditingkatkan.

Pemerintah terus mengembangkan registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) secara online. Sistem tersebut terus dikembangkan untuk meningkatkan pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan SLO dengan menambah fitur baru yang diberlakukan sejak 1 Januari 2016. Hal tersebut disampaikan Dirjen Ketenagalistrikan saat menghadiri peresmian PT Jasa Sertifikasi Indonesia, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (14/2). PT Jaserindo sendiri merupakan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) yang ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 457K/20/DJL.4/2015.

Menurut Jarman, beberapa fitur pengembangan registrasi SLO tersebut antara lain tracking permohonan status SLO, salinan SLO yang diterbitkan oleh LIT-TR dapat dicetak melaui situs DJK; dan *tracking* tenaga teknik pemeriksa yang disertai dengan foto-foto pelaksanaan yang diunggah secara langsung (real time) menggunakan G*lobal Positioning System* (GPS) yang disertai titik koordinat. Jarman menyampaikan bahwa pada tahun 2015 SLO yang telah diregistrasi SLO sebanyak 1.892.933 sertifikat atau sekitar 63% dari sambungan baru.

"Hal ini merupakan tantangan untuk LIT-TR yang diantaranya adalah PT Jaserindo untuk meningkatkan pelayanan proses penerbitan SLO terhadap 3 juta sambungan baru tersebut," ungkap Jarman.

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) sendiri bertugas untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah menjadi mitra strategis bagi Pemerintah dalam mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan, khususnya pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang dipasang pada konsumen rumah tangga untuk mewujudkan tersedianya instalasi tenaga listrik yang aman dan andal bagi konsumen.

Jarman berharap PT Jaserindo ikut berkontribusi membantu Pemerintah dalam mengedukasi dan mengkampanyekan keselamatan Ketenagalistrikan kepada masyarakat, dengan cara mensosialisasikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak/elektronik, leaflet, dan lain-lain.

"Selamat atas beroperasinya PT Jaserindo, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi PT Jaserindo dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik nasional terutama dalam mewujudkan terciptanya keselamatan ketenagalistrikan," tutup Jarman. (PSJ)

Resensi Buku

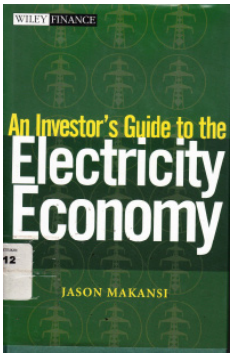

Judul: *An Investor's Guide to The Electricity Economy*
Pengarang: Jason Makansi
Data Fisik: xiii, 272 hlm.
Data Terbit: New York; John Wiley& Sons, 2002

Tahun 2001 mungkin menjadi tahun yang paling penuh gejolak dalam sejarah modern industri energi. Seperti telekomunikasi, komputer dan teknologi informasi, dan bisnis internet/*e-commerce* selama dua dekade terakhir, begitu pula potensi meraih keuntungan dalam berinvestasi di bidang kelistrikan. Deregulasi/kebijakan pemerintah memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara lebih bebas sehingga meningkatkan persaingan menjadikan investor memanfaatkan teknologi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan mengumpulkan kekayaan.

Dengan fokus pada pemahaman dinamika pasar dan modal teknologi, Jason Makansi menunjukkan pembaca dengan menggunakan analis hype, menemukan peluang baru, dan berinvestasi dengan bijak. Dibagi menjadi tiga bagian: "Industri," "Investor," dan "Studi Kasus", buku ini memperkenalkan pembaca pada tren terbaru dan industri yang relevan, wawasan kritis dan penelitian berdasarkan metodologi yang diuji penulis, serta perusahaan dan teknologi yang mengubah industri.

Topik lain yang dibahas meliputi:
* Peluang investasi yang terabaikan pada batubara, nuklir, penyimpanan energi, dan sektor transmisi
* Layanan informasi energi dan energi terdistribusi
* Krisis kelistrikan California dari tahun 2000—2001
* Profil perusahaan inovator industri

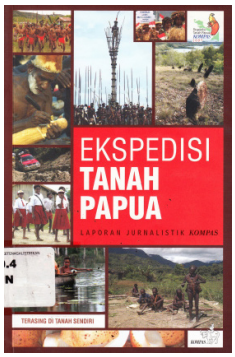

Judul: Ekspedisi Tanah Papua
Pengarang: Fandri Yuniarti (Editor)
Data Fisik: xiv, 294 hlm.
Data Terbit: Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2009

Papua lebih dari sekadar koteka atau emas di Tembagapura. Eksotisme Papua menarik perhatian siapa saja yang pernah menjejakkan kaki di sana. Dari kejelian Gubernur Belanda J van Baal di tahun 1953 membangun Hollandia yang sekarang Jayapura, hingga Michael Rockefeller yang datang ke Agats dan meninggal di Sungai Betsj pada tahun 1961.

Ekspedisi tanah Papua oleh harian Kompas memberikan pandangan dan catatan baru perihal manusia dan kemanusiaan yang terpinggirkan di pulau dengan sumber alam melimpah itu. Mereka sempat tertinggal, tetapi punya cita-cita untuk berkembang maju.

Dengan foto-foto indah dan tulisan yang menggugah nurani, buku ini mendekatkan Papua yang kaya tetapi bersahaja kepada kita. Khususnya, mereka yang berjiwa petualang, pengambil keputusan di pemerintah maupun swasta, hingga penikmat kajian sosiologi, antropologi, seni dan budaya.

Resensi oleh:
Dina Andriani
Pustakawan Muda

Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Workshop Reformasi Subsidi Energi di Meksiko

Direkur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menghadiri workshop tentang reformasi subsidi bahan bakar fosil di Mexico City, Senin (22/2) hingga Selasa (23/2). Dalam kesempatan tersebut, Jarman menyampaikan kebijakan Subsidi Listrik Indonesia. Dalam paparannya, Jarman menyatakan bahwa subsidi listrik diprioritaskan bagi kelompok masyarakat miskin, sedangkan tarif untuk konsumen lainnya ditetapkan sesuai harga keekonomian.

Menurut Jarman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku regulator akan terus menjaga pasokan listrik secara efisien serta menjaga keseimbangan antara kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen. Alokasi subsidi listrik dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dimana saat ini rasio elektrifikasi baru mencapai 88% dan pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Workhsop yang diselenggarakan oleh *International Energy Agency* (IEA) ini mengundang anggota-anggota IEA terkait reformasi subsidi energi. Sejak tahun 2015 Indonesia tergabung aktif dalam organisasi energi dunia ini.

Jarman dalam kesempatan tersebut menyampaikan kebijakan reformasi subsidi listrik di Indonesia yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan di Indonesia antara lain kebijakan *tariff adjusment* yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no. 31/2014. Menurut Jarman, kebijakan ini mampu menurunkan subsidi listrik di Indonesia.

Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan untuk pemberian subsidi listrik tepat sasaran, khususnya pelanggan listrik dengan daya 900 VA. Sesuai dengan roadmap reformasi tarif dan subsidi listrik, pelanggan 450 VA dan 900 VA yang kaya akan dikeluarkan dari penerima subsidi. Selain itu tahun depan pemerintah akan memberlakukan penyederhanaan golongan tarif. Saat ini terdapat 37 golongan tarif dan akan disederhanakan menjadi 25 golongan pada tahun depan.

Terkait kebijakan subsidi listrik di tahun 2016, Menteri ESDM bersama DPR telah sepakat untuk mengalokasikan Rp38,39 triliun untuk subsidi listrik tahun 2016, selain kebijakan baru untuk menghapus subsidi dari pelanggan perumahan kaya. Saat ini tengah dilakukan pencocokan data masyarakat miskin pelanggan 900 VA berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan akan selesai triwulan pertama tahun ini.

Pada tahun 2015, semua 900 VA pelanggan perumahan diberikan subsidi, tapi pada tahun 2016 sekitar 18.850.000 900 VA pelanggan akan dikeluarkan dari pelanggan bersubsidi, hanya 4.150.000 pelanggan perumahan miskin yang akan diberikan subsidi.

Dalam workshop yang diselenggarakan selama dua hari ini, Jarman didampingi Kepala Subdit Harga dan Subsidi Listrik Jisman Hutajulu. Pada hari kedua dilakukan pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Meksiko, khususnya dalam menentukan target-target kebijakan subsidi listrik di dua negara dengan IEA selaku fasilitatornya. (PSJ)

Laporan Dari Meksiko: Saatnya Era Reformasi Subsidi Energi

Subsidi energi di dunia pada tahun 2014 mencapai USD$550 milyar. Indonesia dan Meksiko menyumbang 33 milyar diantaranya. Terdapat upaya-upaya dari berbagai negara di dunia, terutama setelah jatuhnya harga minyak dunia pada tahun 2014, untuk meninjau kembali kebijakan subsidi bahan bakar. Namun upaya reformasi subsidi berbagai negara dinilai kurang berhasil, umumnya karena kurang dapat menggalang dukungan publik, dan gagal memberikan kompensasi yang tepat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia diundang ke Meksiko City, Senin (22/2) dan Selasa (23/2) untuk menyampaikan paparan mengenai reformasi tarif dan subsidi energi di Indonesia. Rombongan dipimpin oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dan didampingi Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas, Direktur Konservasi Energi, Ditjen EBTKE, dan Ekonom OECD Bara Ampera. Acara bertajuk *Workshop on Fossil Fuel Subsidy Reform in IEA Partner Countries*, ini diselenggarakan oleh *International Energy Agency* (IEA).

Dalam acara tersebut Jarman menyampaikan presentasi mengenai Reformasi tarif listrik di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Sebelumnya Indonesia menggunakan formula: Biaya Pokok+Margin. Pemerintah kemudian menggantinya menjadi Tarif Keekonomian dengan margin 7%.

"Hal ini akan memacu penyedia tenaga listrik (PLN) agar lebih efisien," ungkap Jarman. Selain itu menurutnya untuk Tarif bagi golongan nonsubsidi, juga telah diterapkan a*utomatic tariff adjusment*. Sedangkan subsidi listrik diberikan hanya kepada pelangggan listrik Rumah Tangga, Sosial, Industri dan Bisnis Kecil yang merupakan 1/3 pangsa penjualan listrik PLN.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas, memaparkan mengenai sejarah dan proses reformasi subsidi BBM di Indonesia. Sejak tahun 2015 Indonesia berhasil mencabut subsidi BBM dengan *saving* sekitar Rp200 triliun. Ke depan Indonesia merencanakan untuk menyiapkan Dana Ketahanan Energi yang berfungsi antara lain untuk menjaga harga BBM di pasaran tidak terjadi lonjakan yang signifikan apabila harga minyak dunia berfluktuasi serta menyiapkan skema pengaturan harga minyak retail yang bersifat dinamis mengikuti harga minyak Internasional.

Direktur Konservasi Energi, Direktorat Jenderal EBTKE menyampaikan paparan mengenai perkembangan dan

pengaturan penggunaaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa Peraturan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) yang memacu penggunaan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia sebesar 23% pada tahun 2025. Sedangkan Bara Ampera, ekonom OECD yang diperbantukan dari Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, menyampaikan paparan mengenai sejarah liberalisasi tarif listrik di Indonesia.

Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi workshop tersebut antara lain, mengenai perbedaan prioritas tujuan reformasi subsidi energi di Indonesia dan Meksiko. Di Meksiko pemberian subsidi diberikan hanya kepada Rumah Tangga dan Petani (*farmer*), pengurangan subsidi lebih banyak ditekankan pada sektor kelistrikan, dan ditujukan untuk meningkatkan nilai keekonomian *Comision Federal de Electricidad* (CFE) sebagai perusahaan penghasil listrik milik negara. Sementara di Indonesia pengurangan subsidi dilakukan di sektor listrik dan transportasi (BBM), dan ditujukan selain untuk memberikan ruang fiskal bagi pemerintah, juga untuk menjamin subsidi bagi rakyat miskin yang lebih tepat sasaran. Kedua negara juga berupaya untuk meningkatkan prosentase energi yang dihasilkan dari sumber energi baru dan terbarukan.

Selain Indonesia, kegiatan lokakarya juga menghadirkan pembicara dari Tiongkok, India, dan Chile untuk memaparkan perkembangan reformasi subsidi BBM dan peningkatan efisiensi energi di negara masing-masing. Tiongkok menyampaikan bahwa pengaturan transformasi harga minyak dari pengaturan harga oleh Pemerintah menjadi pengaturan harga yang mengkombinasikan harga minyak Internasional. Chile menyampaikan pengaturan harga minyak bersubsidi dan penerapan pajak apabila harga BBM di luar *range* harga BBM yang sudah ditetapkan. Penggunaan minyak selain dari transportasi tidak termasuk dalam pengaturan ini. Sementara India menyampaikan sejak tahun 2014 telah merubah target ambisius penggunaan Energi Baru dan Terbarukan dari Energi Matahari (*solar*) sebesar 20 GW pada tahun 2022 menjadi 100 GW pada tahun 2022 dengan mengembangkan pengunaan panel surya pada *roof top*. (PSJ)

Kementerian ESDM Bangun 90 PLTS di Tahun 2016

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun anggaran 2016 ini akan membangun 90 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas sebesar 14,7 MW. PLTS tersebut tersebar di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Selain itu akan dibangun pula 5 unit Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) dan 7 unit Pembangkit Listrik Tenaga Microhydro (PLTMh) dengan total kapasitas sebesar 5,3 MW untuk Papua, Gorontalo, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan, serta Kalimantan Utara.

Hal tersebut disampakan Menteri ESDM Sudirman Said saat menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi, dalam acara penandatanganan kontrak kegiatan strategis pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2016, Senin (29/2). Penandatanganan ini adalah penandatangan tahap ketiga di mana penandatanganan kontrak tahap pertama dan kedua telah dilakukan tanggal 14 Januari dan 2 Februari lalu. Penandatangan kontrak tahap ketiga ini merupakan tahap terakhir dari kontrak pengadaan barang dan jasa yang dihadiri oleh Presiden RI, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan tentunya Menteri ESDM sebagai tuan rumah.

"Biasanya bulan September-Oktober masih saja ada lelang yang belum selesai," ungkap Sudirman Said. Hal ini disebutnya karena dokumen yang kurang siap sehingga terjadi beberapa kali perbaikan DIPA, yang berakibat serapan yang masih minim pada bulan September. "Maka setiap tahunnya angka serapan Kementerian ESDM tidak pernah mencapai di atas 67%," ungkapnya. Oleh karena itu Kementerian ESDM membentuk Unit Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur (UP3I) sehingga tahun lalu serapan bisa ditingkatkan.

Acara penandatanganan kontrak kegiatan strategis pengadaan barang dan jasa tahap ketiga ini menandatangani 133 paket dengan nilai keseluruhan 3,04 triliun. Beberapa infrastruktur energi yang dibangun di tahun 2016 ini diantaranya sambungan 89 ribu jaringan gas, pembangunan SPBG di 2 kota, pembangunan sebuah pipa untuk gas, konverter kit untuk nelayan dan kendaraan, serta tangki BBN di Terminal BBM Pertamina. Sedangkan untuk bidang infrastruktur energi baru terbarukan akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang merupakan percontohan di wilayah Kalteng, Kaltim, Jambi, dan Kalsel. Selain itu akan dibangun pula Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang ada di Bekasi dan memasang sejumlah PJU Pintar yang tersebar di Kota-Kota Indonesia. Sudirman menyebutkan bahwa yang dikelola Kementerian ESDM tidak hanya APBN, namun juga investasi swasta. Oleh karena itu, menurutnya Kementerian ESDM mengelola dua aspek penting yaitu bagaimana mengelola investasi swasta dan mengelola anggaran dengan baik.

Dalam laporannya Sudirman Said juga menyampaikan tentang ringkasan kinerja sub sektor Kementerian ESDM. Pada akhir tahun 2015, capaian rasio elektrifikasi melebihi dari target yang diperkirakan.

"Adapun realisasi yang tercapai pada tahun 2015 sekitar 88,30%, yang semula ditargetkan hanya sekitar 87,35%," ungkap Sudirman. Hal lain yang dilaporkan Sudirman Said adalah program 35.000 MW yang mana sudah terjadi penandatanganan sebesar 17.000 MW yang saat ini masih dalam proses konstruksi maupun juga dalam proses *financial closing*.

"Kita akan mendorong transformasi PLN karena beban PLN untuk lima tahun kedepan lebih berat yang tidak mungkin dikelola secara sentralisasi seperti saat ini. Kemudian Perpres juga yang mengamanatkan dibentuknya PLN Energi Baru dan Terbarukan, serta kita akan mewujudkan Indonesia Terang menerangi 12 ribu desa yang tertinggal yang akan kita wujudkan", tutup Sudirman Said. (MH/PSJ)

Menteri ESDM: Saatnya Perencanaan Ketenagalistrikan Dilakukan Secara Terbuka

Sudirman Said menegaskan pentingnya perencanaan ketenagalistrikan jangka panjang dan dilakukan secara terbuka.

Perencanaan subsektor ketenagalistrikan tidak boleh lagi dilakukan sembunyi-sembunyi. Pembahasannya harus diketahui oleh publik khususnya para pembangku kepentingan yang terlibat. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan perencanaan ketenagalistrikan yang matang. Selain itu perencanaan harus dilakukan untuk kepentingan jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan energi di masa depan. Hal tersebut ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat membuka Focus Group Discussion Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2016 – 2025, di Hotel Dharmawangsa, Selasa (1/3).

Pembahasan perencanaan ketenagalistrikan tersebut sengaja dihadiri Menteri ESDM karena ia ingin mendengar secara rinci perencanaan kebutuhan tenaga listrik. Menurutnya program 35.000 MW yang telah berjalan satu tahun harus dilihat, direview, serta didorong perkembangannya sehingga sesuai dengan target. Sudirman juga ingin memastikan tidak ada gap yang terjadi di daerah yang kaya energi namun kekurangan pasokan listik.

"Contohnya di Kalimantan Timur dan Indonesia timur. *Gap* terjadi karena kita tidak peduli holistik. Tidak peduli jangka panjang," papar Sudirman. Ia juga mengingatkan akan bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) yang harus sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Menurut Sudirman, membangun pembangkit listrik dari EBT harus ngotot. "Oleh karena itu porsi-porsi yang diputuskan tidak untuk diperdebatkan," tegasnya. Dari 35.000 MW yang akan dibangun tidak perlu diperdebatkan lagi komposisinya. 5.000 MW akan dibangun oleh PT PLN (Persero) dan 30.000 MW akan dibangun oleh pengembang listrik swasta atau *Independent Power Producer (*IPP).

Pemerintah ingin PT PLN (Persero) membereskan transmisi sehingga siap untuk mengaliri listrik 35.000 MW. Sudirman mengingatkan bahwa setelah 35.000 MW ditambah 7.000 MW terbangun, PT. PLN akan mengelola kapasitas dua kali lipat dari kapasitas listrik saat ini. Untuk itu perubahan termasuk di bidang sumber daya manusia dan perencanaan harus dilakukan dengan optimal. *Group Discussion* RUPTL ini dihadiri oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Kuntoro Mangkusubroto, Dirjen Energi Baru Terbarukan Rida Mulyana, Dirjen Migas IGN Wiratmadja, Dirjen Minerba Bambang Gatot, pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian terkait, serta direksi PT PLN (Persero).

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Ketenagalistrikan Jarman memaparkan draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tahun 2015 s.d. 2034 yang saat ini masih menunggu pembahasan dengan Komisi VII DPR RI untuk pengesahannya. Menurutnya meski masih draft, RUKN ini dapat digunakan sebagai acuan PT PLN (Persero) untuk menyusun RUPTL. RUKN sendiri berisi penjelasan tentang bauran energi, rasio elektrifikasi, dan kebijakan pengembangan penyediaan tenaga listrik. Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir dalam paparan mengenai draft RUPTL menyampaikan bahwa PLN siap melakukan efisiensi di segala lini dan mengharapkan keterbukaan dari seluruh mitra termasuk pengembang listrik swasta agar perencanaan ketenagalistrikan dapat dilaksanakan dengan baik. (PSJ)

Menteri ESDM Beri Perhatian Besar Pada Program Infrastruktur Ketenagalistrikan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Untuk itu ada tiga tekanan yang diberikan Sudirman Said pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Tekanan pertama menurutnya adalah bagaimana energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik harus dibangun sesuai dengan perencanaan, yang kedua adalah bagaimana PT PLN (Persero) bermitra dengan pengembang listrik swasta mengingat kapasitas yang dibangun akan lebih banyak, dan tekanan ketiga adalah bagaimana melistriki daerah timur.

Pokok-pokok perhatian tersebut disampaikan Sudirman Said saat bertemu dengan pengembang listrik swasta atau *Independent Power Producer* (IPP), Kamis (3/2) di kantor Ditjen Ketenagalistrikan. Sudirman optimistis semakin hari kapasitas pembangkit listrik dari EBT akan semakin besar, sehingga ketergantungan pada energi fosil bisa dikurangi. Ia akan mengawal Dana Ketahanan Energi dan Program Indonesia Terang (PIT) yang dijadikan program prioritas Kementerian ESDM di sub sektor ketenagalistrikan. Program tersebut berjalan seiringan dengan program 35.000 MW yang ditargetkan beroperasi di tahun 2019.

Sudirman juga mengingatkan kembali mengenai Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN) yang dipimpin oleh Nur Pamudji. Menurut Sudirman, UP3KN bukan menggantikan peran pemerintah atau PLN, melainkan menjembatani dan mendengarkan para pengembang listrik swasta jika ada masalah. Nur Pamudji yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan presentasi menyampaikan bahwa hal yang sering menghantui pengembangan pembangkit listrik adalah masalah tata ruang. Selain itu aturan di daerah yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan pusat juga menghambat pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan. Namun ia optimis

Menteri ESDM Sudirman Said menandatangani berita acara komitmen pengembang listrik swasta dalam program 35.000 MW saat pertemuan di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kamis (3/2).

Sudirman Said sampaikan bahwa pemerintah beri perhatian besar pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

kendala tersebut dapat diselesaikan dengan koordinasi bersama.

Selain pentingnya koordinasi, saat ini telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 8 Januari 2016. Melalui Perpres tersebut, PT PLN (Persero) dan IPP mendapatkan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, dan penyediaan tanah.

Direktur Pengadaan PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso dalam acara tersebut menyatakan bahwa PT. PLN akan meningkatkan fungsi *Project Management Office* (PMO). Sebelumnya menurut Iwan, PMO hanya menangani program-program pembangkit listrik milik PLN. Menurutnya dua bulan ke depan PMO akan ditingkatkan untuk memonitor program-program IPP.

"PLN akan berkoordinasi dengan IPP, bagaimana membuat milestone project sehingga monitoring dapat dengan mudah dilakukan," jelas Iwan Supangkat.

Pertemuan ketiga Menteri ESDM dengan pengembang listrik swasta ini diapresiasi oleh Komisaris Utama PT PLN (Persero) Kuntoro Mangkusubroto. Menurut Kuntoro, masalah kelistrikan menurutnya adalah sebuah gerakan sehingga langkah pertemuan ini dianggapnya baik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Sudirman dalam penutupan diskusi menegaskan kembali perlunya keterbukaan dan dukungan dari semua pihak. "35.000MW bukan hanya program tapi sebuah gerakan dimana semua pihak terlibat. Gerakan nasional ini harus di-*support* semua elemen. Jika semua cek, tidak ada alasan untuk pesimis," tegasnya. (PSJ)

Acara ini dimanfaatkan untuk berdiskusi dan saling sharing informasi antara pemerintah dengan IPP.

Forum Pemimpin EBTKE Hasilkan Komitmen Bangun Infrastruktur Kelistrikan

Menteri ESDM Sudirman Said memberikan penjelasan kepada wartawan usai menggelar Forum Pemimpin EBTKE.

Jumat (4/3) hingga Sabtu (5/3) pemerintah bersama pimpinan BUMN sektor energi baru dan terbarukan (EBT) menggelar Forum Pemimpin EBTKE di Hotel Padma Bandung. Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua dengan mengangkat tema 'Terobosan Inovatif, Jalan Utama Kita Mengembangkan EBTKE Nasional'.

Forum dihadiri oleh 40-an peserta yang merupakan pemangku kepentingan EBTKE Nasional. Dari unsur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), hadir Menteri ESDM Sudirman Said dan Direktur Jenderal (Dirjen) EBTKE, Dirjen Ketenagalistrikan beserta pejabat eselon I dan kepala unit terkait di lingkup KESDM. Dari unsur Badan Usaha Milik Negara, hadir direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Pertamina (Persero), dan PT Energy Management Indonesia. Hadir pula representasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Beberapa hal yang dihasilkan dalam pertemuan ini adalah komitmen badan usaha untuk membangun pembangkit listrik berbasis EBT untuk mendukung program kelistrikan nasional. PT Pertamina (Persero) menyatakan komitmennya untuk membantu menerangi wilayah-wilayah Indonesia yang rasio elektrifikasinya masih rendah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 1.000 MW. Komitmen Pertamina tersebut diutarakan Menteri ESDM, Sudirman Said dalam konferensi pers usai Pertemuan Pemimpin EBTKE, di Bandung, Sabtu (5/3).

"Komitmen Pertamina ini akan sangat membantu untuk memperkuat usaha-usaha untuk membangun energi baru terbarukan di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang masih banyak belum terlistriki dan terisolir," ujar Sudirman. Selain itu dalam waktu dekat, Pertamina juga akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT PLN (Persero) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 50 MW di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara

Barat.

Selain komitmen Pertamina untuk membangun 1.000 MW PLTS, PT PLN (Persero) juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung Program Indonesia Terang. Bersama dua Direktur Regional PLN yang sudah ada, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga akan menugaskan dua orang pejabat setara Eselon II untuk fokus menangani kelistrikan di wilayah Indonesia timur, khusus di enam provinsi yang masih rendah rasio elektrifikasinya yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Program Indonesia Terang kita terus melaksanakan persiapan final dan dijelaskan oleh PLN bahwa PLN sudah menugaskan dua Direktur Regionalnya untuk meng-*cover* enam provinsinya di Indonesia Timur," ujar Sudirman.

Dua Direktur Regional tersebut menurut Sudirman akan dibantu dengan tim *task force* minimal pejabat setingkat Eselon II yang akan ditunjuk untuk menjadi kordinator di daerah. Selanjutnya tim tersebut akan bertugas berhubungan dengan Pemda dengan Gubernur dengan Bupati dan tentu saja dengan PLN dan kalangan investor supaya kegiatan di Timur bisa dikelola dengan baik.

Hal penting lain yang dihasilkan dari pertemuan ini adalah finalisasi rencana Pemerintah untuk membentuk Dana Ketahanan Energi (DKE). Menurut Sudirman Said, persiapan-persiapan terkait hal tersebut terus dilakukan.

"Kita terus memfinalkan persiapan-persiapan dalam rangkan pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE), kita bersyukur konsep ini semakin hari semakin di terima oleh masyarakat baik dikalangan dunia bisnis, Legislatif dan juga di kalangan para pemerhati energi," ungkap Sudirman.

Dana Ketahanan Energi (DKE) yang tidak memungut dana dari masyarakat tersebut, selanjutnya bisa juga dipakai untuk mendanai penggunaan biofuel, konservasi energi, *research development* dan kemudian selisih *feed in tariff* yang tidak mungkin di-*cover* oleh PLN atau IPP dan bisa pula dipakai untuk mendanai pembangunan *strategic petroleum research.* (PSJ)

Profil

Sudirman Said Berbagi Inspirasi dalam *One Hour University*

Sudirman Said menceritakan kisah hidup dan pengalamannya dalam One Hour University (27/1).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said didaulat menjadi pembicara dalam acara *One Hour University* yang digagas oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kementerian ESDM di Jakarta (27/1). *One Hour University* telah dilakukan sejak tahun lalu oleh Badiklat dengan menghadirkan pembicara lintas sektoral untuk berbagi inspirasi.

Sudirman memulai kisahnya dengan menceritakan kehidupannya semasa kecil. Meskipun tak berkecukupan secara ekonomi, Sudirman tetap bersemangat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi selepas SMA hingga diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dari situ, Sudirman mulai menceritakan satu per satu karir profesional yang dilakoni, mulai sebagai auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di tahun 1984 hingga berlabuh di PT Pindad pada 2014 sebelum menjabat sebagai Menteri ESDM sejak 27 Oktober 2014.

Sudirman juga aktif di organisasi sebagai Ketua Senat Mahasiswa STAN hingga menjadi salah satu pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) serta *Institute for Corporate Governance* (IICG). Selain itu, bakat menulisnya terasah ketika Sudirman menjadi koresponden Majalah Tempo saat ia melanjutkan studinya di Washington DC, Amerika Serikat.

Pengalamannya mengelola berbagai jenis organisasi tak selamanya mulus. Sudirman menceritakan tantangan yang dihadapi, termasuk dari mereka yang resisten terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan perubahan, Sudirman mengatakan ia mendalami *Organisation Development* (OD) dimana ia belajar tentang cara mengelola perubahan dalam sebuah organisasi.

"Kebetulan dalam sepanjang karier saya, saya berkesempatan mempraktekannya," Sudirman menuturkan. Dalam kesempatan *One Hour University* tersebut, ia menjelaskan tentang jenis-jenis perubahan dalam organisasi, yakni *radical change* (perubahan mendasar

dan seringkali dipicu oleh kejadian penting) dan *incremental change* (perubahan yang dibangun pada sistem yang saat ini ada untuk disempurnakan). Jika *radical change* jarang terjadi pada siklus organisasi, *incremental change* lebih sering terjadi dan tidak terlalu menimbulkan efek trauma. Perubahan juga ada yang direncanakan (*planned change*) yang dilakukan secara terstruktur oleh agen perubahan, tapi ada pula perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned change)* yang terjadi scara spontan dan acak.

Merefleksikan dari jenis-jenis perubahan tersebut, Sudirman mengaku bersyukur karena ketika ia masuk ESDM, kondisi yang ada sedang mendukung untuk adanya perubahan.

"Katanya perubahan paling efektif itu terjadi kalau kita sedang berada di atas *burning platform*, jadi platform yang sedang diduduki itu terbakar. Orang-orang jadi gelisah, ingin berubah. Saya beruntung masuk ke ESDM ketika suasana psikologisnya sedang menunggu hal-hal baru. Dengan cepat kita bisa melakukan konsolidasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Sudirman juga menjelaskan kerangka dalam mengelola perubahan; mulai dari memotivasi perubahan, merumuskan visi, membangun dukungan politik, mengelola transisi hingga menjaga momentum.

Mengakhiri ceritanya, Sudirman menyatakan bahwa dirinya masih terus belajar untuk menjadi pemimpin yang efektif. "Hidup ini adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti, saya pun masih belajar," ujar Sudirman.

Ia menyampaikan setidaknya ada lima hal yang patut diterapkan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Salah satunya, menurutnya, pemimpin yang efektif menghargai keragaman. "Cara pandang sekarang menghargai keragaman. Orang mesti beragam untuk bisa memperkuat," Sudirman menambahkan.

Selain itu, pemimpin yang efektif juga memarjinalkan diri sendiri serta memimpin untuk melayani. Efektifitas dalam memimpin dapat terlihat dari tumbuhnya respek pada pemimpin, bukan takut. Sudirman pun menyoroti aspek selanjutnya yang dimiliki oleh pemimpin efektif, yakni kredibilitas. "Kredibilitas itu merupakan gabungan dari integritas dan kompetensi," Sudirman menjelaskan.

Para peserta *One Hour University* diberikan ruang untuk bertanya pada Sudirman. Salah seorang peserta menanyakan pertimbangan Sudirman saat bersedia ditunjuk menjadi seorang menteri. Sudirman pun kemudian mengenang percakapannya dengan anak bungsunya saat ia masih ragu tentang posisi menteri yang ditawarkan padanya. Sudirman mengatakan anaknya mendukung ia menjadi seorang menteri karena dapat memberikan dampak besar pada masyarakat Indonesia.

"*Dad, go for it. Taking care of 250 million people is much more impactful than only six of us, especially when we can take care of ourselves,*" Sudirman mengutip kata-kata anaknya. Itulah yang Sudirman anggap petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk dapat menerima amanah tersebut. Sudirman pun mengatakan jika selama menjabat sebagai menteri, keputusan-keputusan yang ia ambil tak selalu populer.

"*Leadership is not a popularity contest*," tegasnya. Kepemimpinan bukanlah sebuah kontes popularitas.

Acara *One Hour University* ini rutin diselenggarakan untuk lebih banyak menginspirasi terutama bagi generasi muda. Acara ini dihadiri oleh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM termasuk sejumlah pejabat eselon I dan II. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko dan Direktur Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad tampak hadir dalam acara tersebut. (AMH)

Para peserta One Hour University berasal dari unit-unit di Kementerian ESDM.

MENUJU SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

Kebijakan Subsidi Listrik Tahun 2016

oleh : David F Silalahi

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah terus berupaya menata kebijakan pemberian subsidi listrik agar penerima subsidi listrik benar-benar tepat sasaran, yaitu diberikan bagi masyarakat tidak mampu yang layak disubsidi.

Dimulai dari penghapusan subsidi listrik secara bertahap pada tahun 2013 untuk 4 golongan tarif (rumah tangga mewah, bisnis sedang dan besar, kantor Pemerintah), serta dilanjutkan pada tahun 2014 dengan penghapusan subsidi listrik secara bertahap pada 8 golongan tarif yang dinilai tidak layak disubsidi (termasuk didalamnya industri besar, industri menengah, rumah tangga daya 1300 VA ke atas, penerangan jalan umum), maka pada tahun 2015, dari total 37 golongan pelanggan PLN terdapat 12 golongan tarif yang tidak lagi disubsidi, dan terhadapnya diterapkan mekanisme tariff adjustment.

Sedangkan 25 golongan pelanggan lainnya masih diberikan subsidi tarif, termasuk didalamnya golongan pelanggan industri dan bisnis kecil, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, dan rumah tangga daya 450VA dan 900VA.

Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, maka kebutuhan subsidi listrik yang pada tahun 2012 besarnya mencapai Rp103,33 triliun dapat diturunkan menjadi Rp101,21 triliun pada tahun 2013, diturunkan lagi menjadi Rp99,30 triliun pada tahun 2014, dan ditargetkan turun menjadi Rp66,15 triliun pada tahun 2015.

Namun demikian, Pemerintah melihat masih ada peluang untuk terus menurunkan subsidi listrik, dengan kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran pada tahun 2016, dan diharapkan besaran subsidi listrik dapat turun menjadi Rp38,39 triliun. Kebijakan subsidi 2016 ini akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan berikut.

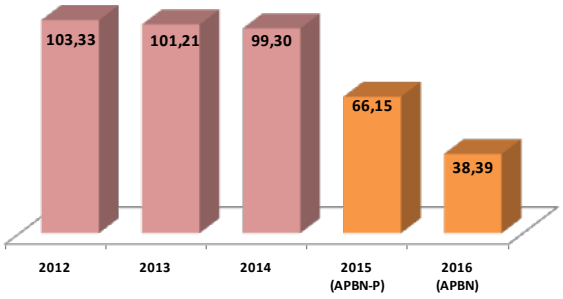

Gambar 1. Perkembangan subsidi listrik

KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TAHUN 2016

Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016, bahwa Pemerintah mengarahkan peruntukan subsidi listrik rumah tangga hanya bagi rumah tangga tidak mampu. Berdasarkan hasil pembahasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja tanggal 17 September 2015 dan hasil pembahasan dengan Panitia Kerja Badan Anggaran dalam rapat 30 September 2015, diputuskan bahwa subsidi listrik tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp. 38,39 triliun dengan sasaran penerima subsidi listrik rumah tangga sebanyak 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan sasaran yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dengan disepakatinya kebijakan subsidi listrik tersebut, maka Kementerian ESDM menugasi PLN agar melakukan pencocokan data TNP2K dengan rumah tangga daya 450VA dan 900 VA yang menjadi pelanggan PLN, dengan harapan kebijakan ini dapat diterapkan mulai 1 Januari 2016.

Seiring perjalanan waktu, Pemerintah menyadari bahwa diperlukan waktu yang cukup untuk proses pencocokan data TNP2K dengan data pelanggan PLN, rumah tangga 450VA dan 900VA PLN yang jumlahnya 45,6 juta. Pemerintah menginginkan pelaksanaannya tidak dilakukan secara

tergesa-gesa untuk menjamin akurasi pencocokan data. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dalam rapat Sidang Kabinet Terbatas tanggal 3 November 2015, Presiden memutuskan bahwa untuk tahun 2016, penghapusan subsidi hanya dilakukan terhadap pelanggan rumah tangga mampu daya 900VA, sedangkan pelanggan rumah tangga daya 450VA dan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 900VA tetap diberikan subsidi.

Pelaksanaan kebijakan yang semula dimulai 1 Januari 2016 diundur, PLN diberikan waktu untuk melakukan pemadanan data tesebut. Setelah menerima data dari TNP2K pada Desember 2015, maka mulai Januari hingga Maret 2016, PLN telah bergerak cepat mencocokan data TNP2K dengan pelanggan rumah tangga 900VA yang terdaftar di PLN.

Hasil pencocokan data tersebut akan dilaporkan kepada Menteri ESDM sebagai target calon penerima subsidi listrik pada golongan rumah tangga daya 900VA. Diharapkan pada pertengahan tahun 2016, kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini sudah dapat mulai dilaksanakan.

RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI

Tercatat ada sebanyak 45,6 juta pelanggan rumah tangga daya 900VA dan 450VA yang menjadi pelanggan PLN (status Februari 2016). Rumah tangga sasaran dalam pemberian subsidi listrik tahun 2016 adalah rumah tangga miskin dan rentan yang termasuk dalam 40% penghasilan terendah secara nasional (Basis Data Terpadu 2011, TNP2K) yang jumlahnya sebanyak 24,7 juta rumah tangga.

Namun demikian berdasarkan pemutakhiran data pada tahun 2015, jumlah rumah tangga miskin dan rentan ini diperkirakan naik menjadi 26 juta rumah tangga. Dalam data termutakhir tersebut, terdapat sebanyak 4,15 juta rumah tangga miskin dan rentan. Artinya PLN hanya perlu mencari sebanyak 4,15 juta rumah tangga miskin dan rentan yang benar terdaftar sebagai pelanggan rumah tangga dengan daya 900VA.

Berikut adalah peta sebaran keberadaan pelanggan rumah tangga daya 900VA pelanggan PLN menurut wilayah geografis, yang mana tampak bahwa pelanggan rumah tangga 900VA terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali dengan jumlah 13,2 juta pelanggan, sedangkan di wilayah Sumatera sebanyak 5,61 juta pelanggan, Kalimantan sebanyak 1,38 juta pelanggan, Sulawesi sebanyak 1,59 juta pelanggan, NTB dan NTT sebanyak 650 ribu pelanggan, serta Maluku dan Papua sebanyak 281 ribu pelanggan.

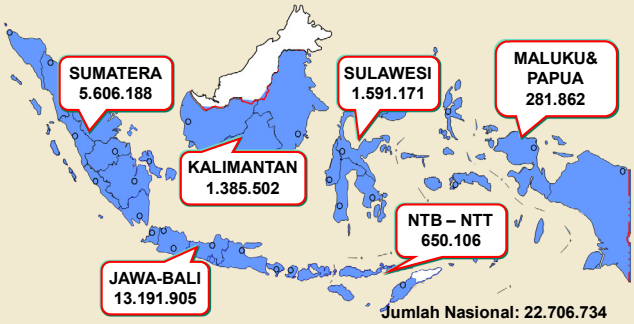

Gambar 2. Sebaran pelanggan rumah tangga daya 900VA

Berdasarkan data TNP2K tersebut, rumah tangga miskin dan rentan sambungan daya 900VA yang total 4,15 juta rumah tangga tersebar di wilayah Jawa-Bali dengan jumlah 1,76 juta rumah tangga, sedangkan di wilayah Sumatera sebanyak 1,43 juta rumah tangga, Kalimantan sebanyak 190 ribu pelanggan, Sulawesi sebanyak 445 ribu rumah tangga, NTB-NTT sebanyak 246 ribu pelanggan, serta Maluku dan Papua sebanyak 77 ribu pelanggan.

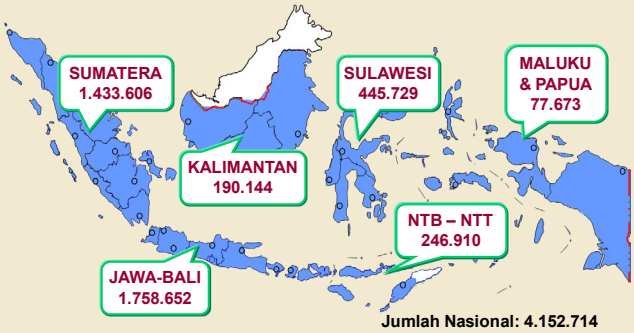

Gambar 3. Sebaran rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 900VA

Terhadap 4,15 juta rumah tangga ini lah PLN melakukan pencocokan data. Berikut adalah proporsi rumah tangga miskin dan rentan daya 900VA terhadap rumah tangga daya 900VA yang menjadi pelanggan PLN.

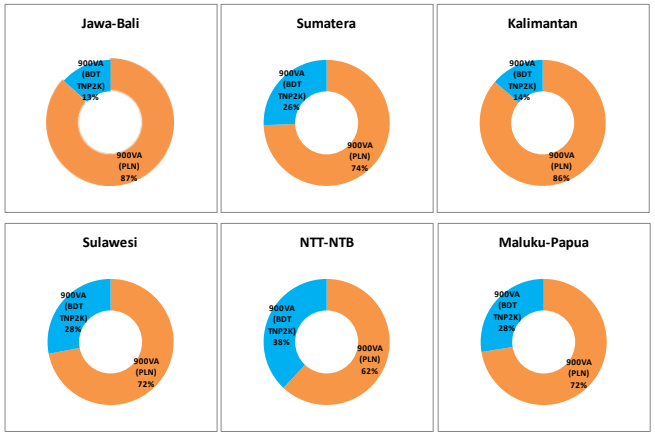

Gambar 4. Pangsa rumah tangga miskin dan rentan miskin dalam data pelanggan 900VA

Berdasarkan hasil analisis data, sebagaimana tampak pada grafik di atas, terlihat bahwa pada wilayah Jawa Bali, terdapat 13% pelanggan rumah tangga daya 900VA yang menjadi pelanggan PLN merupakan rumah tangga miskin dan rentan miskin. Sedangkan pada wilayah Sumatera terdapat 26%, wilayah Kalimantan terdapat 14%, wilayah Sulawesi terdapat 28%, wilayah NTT-NTB terdapat 38%, dan Maluku-Papua terdapat 28%.

MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN SERTA PENGHAPUSAN SUBSIDI PELANGGAN MAMPU

Hasil pencocokan data TNP2K yang dilakukan oleh PLN terhadap data pelanggannya digunakan menjadi dasar pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga. Pada tahun 2016, akan ada sebagian pelanggan rumah tangga 900VA yang memperoleh tarif bersubsidi (rumah tangga miskin dan rentan miskin sejumlah 4,15 juta) dan sebagian lagi membayar tarif keekonomian (tarif nonsubsidi).

Dengan kata lain, dari seluruh pelanggan rumah tangga 900VA yang berjumlah 22,7 juta, akan ada sebanyak 18,6 juta pelanggan yang dihapus subsidinya. Semula pelanggan yang 18,6 juta ini membayar hanya dengan tarif rata-rata Rp568/kWh untuk listrik yang digunakan, maka tarifnya akan naik menjadi Rp1.352/kWh (sama dengan tarif yang dibayar pelanggan R-1 1.300VA), sedangkan 4,15 juta pelanggan yang menjadi penerima subsidi tetap membayar tarif Rp568/kWh.

Bagi pelanggan rumah tangga 900VA yang tidak termasuk kategori miskin dan rentan, Pemerintah memberikan pilihan, apakah ingin tetap berada pada daya tersambungnya 900VA namun membayar tarif non subsidi, atau pindah menjadi daya 1300VA dengan bebas biaya tambah daya.

Untuk memberikan keringanan bagi pelanggan, Pemerintah berencana untuk melakukan penghapusan subsidi listrik ini dilakukan secara bertahap. Pelanggan yang semula membayar rata-rata Rp568/kWh (subsidi Rp.784/kWh) tidak langsung ditagihkan tarif yang baru sebesar Rp1.352/kWh, namun kenaikannya bertahap.

Misalkan kenaikannya dipecah menjadi 3 kali kenaikan sebesar 34% setiap 2 bulan. Pada kenaikan pertama membayar Rp758 (subsidi sebesar Rp594/kWh), pada kenaikan kedua membayar Rp1.013 (subsidi turun menjadi Rp339/kWh), dan pada kenaikan terakhir membayar Rp1.352/kWh (subsidi Rp0 /kWh, tidak lagi disubsidi).

Dengan penghapusan subsidi bertahap, diharapkan dapat meringankan masyarakat dalam membayar tagihan listriknya karena tidak terlalu mengalami lonjakan tagihan listrik dibandingkan dengan pencabutan subsidi sekaligus.

Bagaimana terhadap rumah tangga miskin dan rentan yang termasuk dalam Basis Data Terpadu TNP2K yang saat ini tersambung pada daya diatas 900VA, misalkan tersambung dengan daya 1.300 VA, apakah boleh minta turun daya agar memperoleh subsidi? Pemerintah memperbolehkan pelanggan tersebut turun daya menjadi 450VA atau 900VA dan PLN wajib melayani.

Sedangkan bagi calon pelanggan baru rumah tangga yang menginginkan sambungan daya 900VA, maka calon pelanggan tersebut hanya dilayani PLN jika termasuk dalam kategori rumah tangga miskin dan rentan sesuai Basis Data Terpadu TNP2K yang menjadi acuan pemberian subsidi listrik.

Pemerintah menyadari bahwa dalam proses pendataan dimungkinkan terjadi error kesalahan, sehingga bisa saja ada masyarakat yang seharusnya tetap disubsidi, namun mengalami penghapusan subsidi listrik. Untuk itu, Pemerintah membuka diri terhadap pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan subsidi tepat sasaran ini. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 671/829/SJ tanggal 10 Maret 2016 kepada seluruh Gubernur, Bupati/ Walikota, maka jajaran aparatur Pemerintah Daerah pun turut dilibatkan untuk menampung pengaduan masyarakat, melalui Posko Pengaduan Masyarakat (Posdumas) di tingkat Kelurahan ataupun Badan Permusyawaratan Desa di tingkat Desa, pengaduan tersebut dapat disampaikan.

Listrik penting dalam menggerakkan kehidupan. Subsidi listrik harus diberikan kepada yang berhak.

SOSIALISASI/DISEMINASI KEBIJAKAN

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak Oktober 2015, meskipun pelaksanaan kebijakan subsidi ini baru diterapkan pada tahun 2016. Melalui forum *Focus Group Discussion* yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin redaksi surat kabar/media, wartawan, mahasiswa, akademisi, Pemerintah menyampaikan perubahan kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga melakukan sosialisasi melalui berita-berita di media elektronik/cetak, penayangan iklan layanan masyarakat, serta acara talkshow di televisi dan radio baik skala nasional maupun daerah. Dengan upaya sosialisasi ini, diharapkan kebijakan Pemerintah ini dapat sampai kepada masyarakat dan dipahami secara utuh sehingga mengurangi resistensi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1.Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2015, Kesimpulan Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI 17 September 2015, DPR-RI;

2.Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2015, Laporan Rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016;

3.Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2016, Laporan Penjualan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Februari 2016;

4.Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2015, Data Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang tersambung listrik daya 900VA;

5.Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero);

6.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 671/829/SJ tentang Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Penanganan Pengaduan.

BONUS LISTRIK DAN TINGKAT MUTU PELAYANAN TENAGA LISTRIK

Oleh : Ahmad Amiruddin (Inspektur Ketenagalistrikan Muda)

LATAR BELAKANG

Beberapa waktu yang lalu pengguna listrik di tanah air dihebohkan oleh berita bonus listrik. PLN disebut-sebut membagi-bagikan strom listrik secara gratis kepada konsumen [1]. Beberapa orang men-*screenshot* hasil pengecekan rekening listriknya melalui website PLN. Pada screenshoot tersebut ditampilkan adanya 16 kode token yang bisa dikonversi menjadi kWh meter.

Sebelum kejadian ini, beredar viral pula di internet seorang konsumen listrik prabayar menulis adanya token TMP di struk pembelian listriknya. Pelanggan ini awalnya tidak mengetahui kalau pada struknya terdapat kode token TMP.

Gambar : Struk listrik prabayar [2]

TINGKAT MUTU PELAYANAN PLN

Pada kenyataannya bonus listrik yang dimaksud oleh konsumen tersebut adalah pengurangan tagihan listrik akibat tidak terpenuhinya Tingkat Mutu Pelayanan tenaga listrik PT PLN (Persero). Sebagai perusahaan publik yang bertugas melistriki Nusantara, PLN berkewajiban untuk memaklumatkan standar mutu dan pelayanannya [3].

Pada praktiknya standar mutu dan pelayanan tenaga listrik disebut dengan Tingkat Mutu Pelayanan.

Terdapat 13 (tiga belas) indikator yang menjadi tolok ukur Mutu Pelayanan PLN, adapun indikator-indikator tersebut adalah :

1)tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kV;
2)tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kV;
3)tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt;
4)frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
5)lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
6)jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
7)kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
8)kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
9)kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
10)kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
11)kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
12)kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan
13)waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.

Terdapat 5 (lima) indikator pinalti yang dapat diberikan kompensasi yaitu untuk indikator lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya Tegangan Rendah, kesalahan pembacaan kWh meter dan waktu koreksi rekening.

TMP Vs "SAIDI-SAIFI"

Kita mengetahui bahwa indikator standar keandalan listrik adalah SAIDI dan SAIFI. SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*) [4] adalah rata-rata durasi (lama) gangguan yang dirasakan oleh keseluruhan pelanggan. Sementara SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index (sustained interruptions)*) adalah rata-rata frekuensi gangguan yang dirasakan oleh keseluruhan pelanggan.

Karena menggunakan nilai rata-rata maka dengan ukuran ini dianggap bahwa pelanggan yang mengalami gangguan lama atau lebih singkat memiliki nilai yang sama. Hal tersebut berbeda dengan filosofi TMP. TMP bersifat individual per konsumen.

Prinsip dari TMP pada PLN adalah bahwa tolok ukur pelayanan itu dilihat dari sisi konsumennya. Setiap konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak melihat rata-rata pelayanan terhadap semua konsumen. Semua konsumen sifatnya spesial. Karena itulah maka pemberian kompensasi kepada konsumen berdasarkan yang dirasakan oleh konsumen secara individu dan bukan rata-rata yang dirasakan oleh semua konsumen.

KOMPENSASI ADALAH KEWAJIBAN PLN

Pengurangan tagihan listrik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PLN. Pemberian kompensasi ini bukanlah merupakan pemberian cuma-cuma PLN. Pemberian kompensasi didasarkan pada realisasi Tingkat Mutu Pelayanan terhadap deklarasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Deklarasi TMP oleh PLN setempat merupakan janji PLN kepada konsumen yang harus dilaksanakan oleh PLN.

Jika PLN "cedera" janji, sehingga realisasi pemadaman yang dirasakan oleh pelanggan lebih dari deklarasi (10% lebih besar dari deklarasi), maka pelanggan tersebut berhak untuk mendapatkan kompensasi sebesar 20% dari biaya beban atau rekening minimum.

Jika konsumen tersebut adalah konsumen prabayar (yang notabene tidak dibebankan biaya beban atau rekening minimum) maka nilai kompensasinya setara dengan pascabayar. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bagi konsumen tarif pascabayar, maka pengurangan tagihan akan diperhitungkan dalam tagihan bulan berikutnya. Bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan berupa token listrik. Sampai disini, kita bisa mengerti bahwa yang dimaksud oleh pelanggan sebagai bonus listrik adalah kompensasi pengurangan tagihan listrik akibat tidak terpenuhinya TMP untuk pelanggan prabayar.

Tercatat pada tahun 2015, PLN secara total telah memberikan kompensasi sebanyak Rp55 Milyar untuk 5,4 juta konsumen listrik.

DEKLARASI TMP TAHUN 2016

Deklarasi TMP PLN untuk satu tahun ditetapkan setiap awal tahun oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Deklarasi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan PLN. Adapun unsur utama yang diperhatikan dalam penetapan TMP adalah sistem kelistrikan PLN setempat, sarana dan prasarana yang tersedia serta realisasi TMP tahun sebelumnya.

Setelah melaksanakan evaluasi terhadap usulan PLN, deklarasi TMP tahun 2016 telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan nomor 3K/23/DJL.3 /2016 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2016.

PLN diharuskan untuk mengumumkan deklarasi ini pada tempat-tempat yang mudah diketahui dan dapat diaksses oleh publik. Adapun Ditjen Ketenagalistrikan telah pula melakukan upload terhadap deklarasi TMP ini pada situs http://www.gatrik.esdm.go.id/.

Referensi

[1]D. R. Kusuma. (2016, 14 February). Banyak Masyarakat Tak Tahu Ada 'Bonus' Listrik, Ini Kata PLN. Available: http://finance.detik.com/read/2016/01/06/122514/3111853/1034/banyak-masyarakat-tak-tahu-ada-bonus-listrik-ini-kata-pln.

[2]H. Kusuma. (2016, 17 Februari). Heboh Kode Token Listrik Berisi Voucher Belum Tentu Benar. Available: http://economy.okezone.com/read/2015/11/02/19/1242406/heboh-kode-token-listrik-berisi-voucher-belum-tentu-benar

[3]Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009.

[4]"IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices," IEEE Std 1366-1998, pp. 1-21, 1999.

Indonesia - Japan 2nd Workshop on Power Sector Development

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman membuka acara "*Indonesia - Japan 2nd Workshop on Power Sector Development*" di Hotel Gran Melia (10/2). Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan *Ministry of Economy, Trade and Industry* (METI) Jepang. Ini merupakan acara kedua setelah sebelumnya diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2015.

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman memberikan sambutan pada Japan 2nd Workshop on Power Sector Development, Rabu (10/2)

Dalam acara tersebut, peserta membahas mengenai sektor pembangunan listrik dari sudut pandang ekonomi, termasuk strategi dan rencana keuangannya. Perencanaan keuangan adalah tahap yang sangat penting yang harus direncanakan oleh pemerintah dengan merumuskan dan menerapkan kebijakan, program pengembangan, dan strategi keuangan. Sudut pandang mikro ekonomi juga mendefinisikan strategi keuangan yang secara khusus fokus pada program pemerintah yaitu proyek pembangunan listrik 35 GW yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) dan IPP.

Menurut Jarman, saat ini disadari bahwa masalah keamanan energi di Indonesia menjadi perhatian nasional. Permintaan energi terus meningkat dari waktu ke waktu seiring pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, harus ada program terstruktur untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat di berbagai bidang yang menjadi perhatian, baik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pertumbuhan bisnis khusus ini harus difasilitasi dan diatur dengan baik. Berbagai masukan yang muncul dari semua stakeholder terkait termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta dan profesional sangat dihargai dan diperhatikan. Banyak celah kebijakan yang harus dipersingkat, dan pemerintah saat ini sedang menciptakan landasan yang kokoh bagi persaingan yang adil dan saling menguntungkan.

Jarman berharap, acara tersebut digunakan sebagai kesempatan untuk bertukar ide dan pendapat di antara para peserta dan kemungkinan kolaborasi yang lebih erat antara Indonesia dengan Jepang dalam rencana pengembangan sektor listrik. Jarman juga meminta perwakilan dari pejabat pemerintah terkait dan badan non-pemerintah dapat berbagi kontribusi dan menghasilkan rekomendasi yang baik dalam acara penting tersebut. (UH)

Pengalaman Berharga dari Tri Risma Harini

Para pejabat struktural Kementerian ESDM mendapatkan pengalaman berharga dari Walikota Surabaya terpilih Tri Risma Harini. Dalam Rapat kerja (Raker) Konsolidasi Tahun Anggaran 2016 yang digelar di Padalarang, Jawa Barat, Senin (11/1) hingga Rabu (13/1), Risma membagi pengalamannya menata kota Surabaya selama lima tahun dan mengubah berbagai sistem birokrasi di dalamnya. Walikota Surabaya tahun 2010-2015 tersebut memaparkan gebarakan-gebrakan pelayanan, khususnya pendekatan langsung dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan di Kota Pahlawan tersebut.

Tri Risma berbagi pengalaman dalam menata kota Surabaya selama lima tahun dan mengubah berbagai sistem birokrasi di dalamnya.

Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, para pejabat Eselon 1,2, dan 3 yang menghadiri Raker dapat mengambil manfaat dari sharing yang disampaikan Risma. Sudirman mengapresiasi berbagai sistem Teknologi Informasi (TI) yang menjadi dasar pelayanan di kota Surabaya.

"Sehingga jika ditekan berbagai kepentingan pemilik sistem tinggal mengatakan maaf tidak bisa karena sudah diatur sistem," ungkapnya.

Sudirman juga mengajak para pejabat untuk membangun partisipasi dari pihak-pihak yang dilayani. Sebelumnya Risma membagi pengalamannya mengajak masyarakat dalam berbagai gerakan seperti membersihkan sungai, menata taman sehingga semua merasa memiliki fasilitas umum tersebut.

Mengenai ketegasan, Sudirman menyampaikan bahwa dalam menegakkan beberapa kebijakan, pemimpin harus berhadapan dengan orang-orang yang terganggu dengan kebijakan baik. Untuk itu sikap ketulusan dan bekerja tanpa pamrih harus tertanam di benak para pejabat Kementerian ESDM. Sudirman juga mengapresiasi kerja Risma yang memperhatikan hal-hal detail. Risma sendiri berbagi pengalaman dalam membuat suatu sistem penataan, ia tidak pulang selama tiga bulan.

Sudirman mengaku bahwa masalah perkotaan di Surabaya jauh lebih rumit daripada institusi. Untuk itu ia mengajak para pejabat agar dapat bekerja dengan tulus seperti yang dilakukan Risma yang berasal dari kalangan PNS. Tiga poin penting leadership Ibu Risma menurut Sudirman adalah visi jauh ke depan, tata nilai yang dapat dilihat, serta keberanian untuk mendobrak. Tiga hal ini tersebut diminta untuk dipelajari baik-baik sebagai modal ke depan.

Risma juga berbagi pengalaman bagaimana ia mengingatkan orang-orang yang tidak mau berubah pada kematian. Ia mendapatkan ide untuk menugaskan karyawan yang tidak mau diajak berubah untuk menjadi sopir mobil jenazah.

"Sesekali saya ingatkan mereka, mau numpuk harta benda sebarapun, mau bandel seberapapun akhirnya kamu akan jadi jenazah seperti yang kamu antarkan itu", cerita Risma. Ibu dua anak ini lantas memberi semangat kepada seluruh peserta Raker untuk tidak ragu-ragu menghadapi tantangan perubahan.

"Asal kita *bener* dan hanya bekerja untuk rakyat Tuhan pasti memberi jalan kita dan rakyat akan mendukung", tegasnya. (PSJ)

Sesditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko menyampaikan bahwa getting electricity di Indonesia membaik, yang awalnya 101 kini naik menjadi peringkat 45 dari 189 negara.

GETTING ELECTRICITY INDONESIA MEMBAIK

Kenaikan peringkat *Getting Electricity* Indonesia pada survey Ease of Doing Business (EODB) yang dilakukan oleh World Bank naik cukup signifikan. Jika akhir 2014 Indonesia masih peringkat 101 dari 189 Negara, tahun ini kemudahan mendapatkan listrik Indonesia ada di peringkat 45. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko saat membuka *coffee morning*, Kamis (21/1). Acara yang mengundang para pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan bulan Januari ini mengangkat tema *soft launching* Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik.

Sujatmiko hadir mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman yang berhalangan hadir karena tugas negara di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat membacakan sambutan Dirjen Ketenagalistrikan, Sujatmiko mengatakan bahwa Setiap tahun World Bank melakukan *survey Ease of Doing Business* (EODB) pada 189 negara termasuk Indonesia di mana satu indikatornya adalah *Getting Electricity*.

Parameter yang digunakan untuk menentukan peringkat *Getting Electricity* antara lain jumlah prosedur, jangka waktu pelaksanaan, dan biaya yang dikenakan. Obyek survey adalah sambungan listrik kapasitas 140 kVA 3 fasa di Jakarta dan Surabaya. Survei dilakukan dengan metode wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan. Terakhir pada tahun 2016 peringkat EODB Indonesia berada pada 109.

"Kenaikan EODB tersebut sangat dibantu oleh kenaikan peringkat *Getting Electricity* yang cukup signifikan," ujar Sujatmiko.

Peringkat *Getting Electricity* Indonesia sendiri masih dapat

dinaikkan karena temuan survei World Bank pada tahun 2016 masih belum mencapai besaran parameter *Getting Electricity* yang ditetapkan, yaitu jumlah prosedur masih 5 prosedur sedangkan pemerintah menargetkan menjadi 3 prosedur, jangka waktu masih 95 hari, sementara target adalah 40 hari, sedangkan biaya dari 383% *income per capita* ditargetkan menjadi 161%.

Untuk mempercepat perbaikan peringkat *Getting Electricity* Indonesia, layanan satu pintu sambungan listrik merupakan salah satu solusi. Layanan yang akan diterapkan PT PLN (Persero) mulai tahun 2016 ini akan mengintegrasikan tiga pelaku usaha yang terlibat dalam sambungan listrik yaitu PLN sebagai penyedia listrik, Instalatir sebagai pemasangan instalasi listrik, serta Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) sebagai penerbit sertifikat laik operasi.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Deregulasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Yuliot menyampaikan sejumlah upaya pemerintah untuk meningkatkan peringkat Indonesia, yaitu dengan deregulasi berbagai kebijakan seperti mempersingkat prosedur, waktu proses dan biaya yang mengacu pada indikator peringkat 30 di negara-negara lain. Selain itu menurutnya dilakukan juga sosialisasi untuk memastikan implementasi peraturan kepada publik dan media di DKI Jakarta dan Surabaya.

Pihaknya juga akan terus melakukan monitoring untuk memantau seluruh proses perbaikan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan.

Yuliot menyampaikan bahwa posisi daya saing kemudahan berusaha dari 189 negara yang disurvei. Peringkat ini tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90, Filipina posisi 103. Yuliot mengharapkan para pemangku kepentingan sub sektor ketenagalistrikan berperan aktif meningkatkan peringkat *Getting Electricity* sebab parameter ini sangat mempengaruhi peringat kemudahan berusaha. (PSJ)

Suasana Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan dengan para pemangku usaha. Setiap ada kebijakan baru, Ditjen Ketenagalistrikan selalu menyelenggarakan coffee morning.

Pemerintah Dorong Pemanfaatan Limbah PLTU

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan presentasi mengenai pemanfaatan limbah PLTU di Indonesia.

Limbah Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara sering kali menjadi persoalan lingkungan hidup. Meskipun demikian limbah PLTU berupa *fly ash* dan *bottom ash* dapat dimanfaatkan secara optimal seerti pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pemerintah melalui Kementerian ESDM serius memperhatikan pemanfaatan limbah tersebut dengan bekerja sama dengan Japan Coal Energy Center (JCOAL). Hal tarsebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman saat membuka Seminar *On Coal Ash Mixed In Indonesia* 2016 di Gedung Badan Diklat ESDM, Selasa (16/2).

Menurut Jarman, pembangunan PLTU akan digalakkan hingga tahun 2025 mengingat komposisi bauran energi untuk pembangkit listrik dari batubara direncanakan mencapai 56,97% dari total pembangkit listrik. Kebutuhan batubara saat ini sebesar 87,7 juta ton untuk PLTU batubara. Jumlah ini meningkat seiring dengan adanya program pemerintah 35.000 MW, sehingga untuk tahun 2019 diperkirakan kebutuhan batubara meningkat menjadi 166,2 juta ton. Jika limbah abu batubara *fly ash* dan *bottom ash* dihasilkan sekitar 5%, maka limbah yang dihasilkan mencapai 8,31 juta ton di tahun 2019. "Angka 8,31 juta ton merupakan angka yang sangat banyak," ungkap Jarman.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian ESDM telah melakukan kesepakatan bersama (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Kementerian PUPR tentang kerjasama penelitian pengembangan teknologi serta percepatan pemanfaatan *fly ash* dan *bottom ash* untuk pembangunan infrastruktur PUPR pada tanggal 16 Oktober 2015 lalu. Jarman mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada perjanjian antar Eselon II agar perencanaan pemanfaatan limbah yang termasuk kedalam golongan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut dapat segera direalisasikan.

Seminar pemanfaatan limbah PLTU tersebut dihadiri oleh instansi pemerintah pusat seperti Kementerian LHK dan PUPR, PT PLN (Persero) dan *Independent Power Producer* (IPP). Seminar sehari ini juga menghadirkan pembicara dari Jepang agar peserta dapat belajar bagaimana penanganan limbah PLTU di Jepang sehingga dapat dimanfaatkan. Jarman berharap pembahasan tentang lingkungan ketenagalistrikan tersebut tidak hanya berhenti pada seminar ini saja namun dapat ditingkatkan lebih lajut seperti memberikan dukungan terhadap program yang telah direncanaan. (PSJ)

Menteri ESDM Lantik Sesditjen Ketenagalistrikan

Agoes Triboesono (ketiga dari kiri) menggantikan Sujatmiko (kedua dari kiri) sebagai Sesditjen Ketenagalistrikan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said pada Jumat (19/2) melantik Agoes Triboesono sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Ketenagalistrikan. Pelantikan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan beberapa pejabat tinggi pratama (Eselon I) dan madya (Eselon II) di lingkungan Kementerian ESDM. Agoes Triboesono sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sesditjen Ketenagalistrikan sebelumnya, Sujatmiko dilantik sebagai Kepala Pusat Komunikasi Publik KESDM.

Agoes Triboesono bukan orang baru di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan terakhir sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan sebelum menjabat sebagai Sesditjen Minerba.

Menteri ESDM menyampaikan bahwa pengangkatan dan rotasi yang dilakukan di Kementerian ESDM semata-mata untuk penataan organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Menurutnya perubahan harus dilihat sebagai sesuatu yang biasa. Perubahan dilakukan dengan semangat baru, cara pandang baru, dan orang-orang baru. "Mendorong perubahan harus dengan unsur–unsur yang baru, orang luar, dan wawasan baru," kata Sudirman. Ia mengibaratkan gelas jika diisi air terus tidak akan berubah, namun jika dimasukkan redoxon akan merubah warna dari gelas dan air di dalamnya.

Sudirman juga menitipkan pesan kepada ibu-ibu dharma wanita sebagai pendamping pejabat-pejabat yang dilantik agar para pejabat dapat menjaga kesimbangan antara kesehatan dan performa kerja. Menteri juga berpesan agar pejabat selalu mengedepankan nilai kejujuran dan ketulusan. "Carilah bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang saya tinggalkan," ungkapnya. Menurutnya semua orang harus mengetahui bahwa Kementerian ESDM tidak hanya menghasilkan energi bersih tapi juga menjadi kementerian yang bersih. Dalam acara ini Menteri ESDM melantik empat orang pejabat Eselon I dan 17 pejabat Eselon II. Seusai pelantikan, dilakukan ramah tamah dan rapat pimpinan diperluas yang dihadiri oleh Menteri dan Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM. (PSJ)

Menteri ESDM Sudirman Said mengambil sumpah pejabat yang dilantik

Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari - November 2015

oleh: Dina Andriani (Pustakawan Muda)

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK
1.	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
2.	Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
3.	Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2015 Tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi
4.	Peraturan Menteri ESDM No. 03 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/ PLTMG, Dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung Dan Penunjukkan Langsung
5.	Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
6.	Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015
7.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran
8.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara
9.	Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
10.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas
11.	Keputusan Menteri ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015 s.d 2024
12.	Keputusan Menteri ESDM No. 0170 K/90/MEM/2015 tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM No. 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan
13.	Keputusan Menteri ESDM No. 0171 K/90/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Penyelesaian Pembangunan Insfrastruktur Ketenagalistrikan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

HINDARI KEBAKARAN RUMAH
INSTALASI LISTRIK
HARUS BERSERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO)
Instalasi listrik aman, hidup kita nyaman
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Menggunakan Peralatan
Listrik Berstandard
SNI
Hak Konsumen Terlindungi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BERANI JUJUR DAN ANTI KKN, HEBAT!

Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan

sebagai

Kawasan Anti Korupsi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id